**PROPOSAL**

**ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRASI KEILMUAN**

**DALAM KURIKULUM DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

Promotor: Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D

Kopromotor: Dr. Ahmad Arifi, M.Ag

**[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1ro29iIXfAhWLeysKHctPB1gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uny.ac.id/profil/lambang-universitas&psig=AOvVaw3pWGdIAsxycqSK6Pt_Yhc0&ust=1543974795126436)**

Oleh:

Nurul Huda

NIM 18701264005

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mendapatkan gelar Doktor Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2020**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah
2. Identifikasi Masalah
3. Batasan Masalah
4. Rumusan Masalah
5. Tujuan Penelitian
6. Produk Penelitian
7. Spesifikasi Produk
8. Manfaat Penelitian

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

1. Kajian Teori
2. Analisis Kebijakan
   1. Pengertian Analisis Kebijakan
   2. Proses Analisis Kebijakan
   3. Sistem Analisis kebijakan
   4. Peramalan Kebijakan
   5. Pengembangan Alternatif kebijakan
   6. Rekomendasi Kebijakan
   7. Implementasi Kebijakan
   8. Pemantauan Kebijakan
   9. Evaluasi Kebijakan
3. Universitas Islam

a. Sejarah Universitas

b. Kebebasan Akademik

c. Konsep Universitas Islam

d. Universitas Islam di Indonesia

e. Universitas Islam Negeri

1. Integrasi Keilmuan

a. Konsep Intergasi Keilmuan

b. Relasi Agama dan Ilmu

b. Integrasi Ilmu di Universitas Islam Negeri

1. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

b. Kurikulum PTKI

c. Basis Kurikulum PTKI

d. Kurikulum Berbasis KBK

e. Kurikulum Berbasis KKNI

1. Kajian Penelitian yang Relevan
2. Kerangka Pikir
3. Pertanyaan Penelitian

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Metode Penelitian Tahap I
2. Jenis Penelitian
3. Tempat dan Waktu
4. Subyek dan obyek penelitian
5. Teknik dan instrumen pengumpulan data
6. Keabsahan Data
7. Teknik Analisis Data
8. Metode Penelitian Tahap II
9. Pengertian FGD
10. Kelemahan FGD
11. Etika FGD
12. Model FGD
13. Jumlah dan Kriteria Peserta FGD
14. Analisis kebijakan pada FGD I
    * 1. Tujuan FGD I
      2. Peserta FGD I
      3. Tim Pelaksana FGD I
      4. Perlengkapan FGD
      5. Hari dan Tempat FGD
      6. Pelaksanaan FGD I
15. Tahapan pelaksanaan FGD I
16. Teknik merumuskan masalah kebijakan
17. Analisis hasil FGD
18. Analisis kebijakan dalam FGD II
19. Jumlah dan kriteria peserta
20. Tim Pelaksana FGD II
21. Perlengkapan FGD II
22. Hari dan Tempat FGD II
23. Pelaksanaan FGD II
24. Tahapan pelaksanaan FGD II
25. Materi FGD II

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I:**

**PENDAHULUAN**

* + - 1. **Latar Belakang Masalah**

Mandat integrasi keilmuan di Universitas Islam Negeri (selanjutnya ditulis UIN) dimulai dari perubahan 2 Institut Agama Islam Negeri (selanjutnya ditulis IAIN) dan 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (selanjutnya ditulis STAIN) menjadi UIN. Pertama, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002. Kedua, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004. Kemudian diikuti 3 keputusan presiden, yang mengubah 14 IAIN menjadi UIN sehingga saat ini telah ada 17 UIN di Indonesia.

UIN sebagaimana tertulis dalam semua keputusan presiden tentang perubahan IAIN menjadi UIN, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara bidang ilmu agama Islam dengan bidang ilmu umum. Integrasi keilmuan lahir karena selama ini ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu yang dipahami saling bertentangan. Sejak adanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) di Indonesia yang dimulai oleh KH. Abdul Halim tahun 1917 di Majalengka (Penyusun, 1998), Sekolah Tinggi Islam (STI) di Padang dan Jakarta, Akademi Dinas Ilmu Agama (AIDA) Jakarta, hingga IAIN (Saifuddin et al., 2019) PTKI hanya menekuni bidang kajian keislaman yang normative, dikotomis-atomistik (M. A. Abdullah, 2017). Sejak tahun 1980-an PTKI sebetulnya telah membuka studi-studi umum menyesuaikan dengan perubahan status sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama yang telah disetarakan dengan sekolah umum dengan ciri khas agama Islam, namun tidak bisa menggeser dominasi studi keislaman (Soebahar, 2013). Historisitas agama (Islam) di PTKI baru muncul terutama setelah era Harun Nasutison di IAIN Jakarta dalam kajian teologi dan Mukti Ali di IAIN Yogyakarta dalam kajian perbandingan agama (Jabali & Jamhari, 2002).

Salah satu konsekwensi menjadi UIN adalah kajian keilmuan meluas, bukan hanya ilmu keislaman tetapi juga ilmu umum. Hal ini selaras dengan mandat utama UIN sebagai institusi pendidikan tinggi bidang agama Islam, dengan tugas tambahan sebagai penyelenggara program ilmu umum. UIN secara kelembagaan, biaya operasional, dan penyelenggaraan program studi keislaman tetap di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia, sedangkan pembinaan akademik bidang ilmu di luar ilmu keislaman/ilmu umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penegasan tersebut tertuang dalam surat persetujuan menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/MPN/HK/1004 tanggal 23 Januari 2004 yang ditandatangani M. Malik Fadjar; Surat No. MA/22/2004 tertanggal 23 Januari 2004 tentang Usulan Perubahan IAIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang menjadi UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang; Keputusan bersama menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI No. 1/0/SKB/2004, No. ND/B.V/I/Hk.00.1/058/04 tertanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang menjadi UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang; dan Keputusan Presiden No 50 tahun 2004 tertanggal 21 Juni 2004.

Perubahan IAIN dan STAIN menjadi UIN merupakan gerak dari perguruan tinggi konvensional dan local menjadi good university governance, yang modern, sehingga membutuhkan pengerahan energi yang cukup besar. Implementasi konsep tidak hanya perubahan hard ware dan soft ware, tetapi berlanjut hingga brain ware, sehingga akan terjadi perubahan perilaku (behavior) dari semua pelaku-aktor yang lebih tanggap (responsive) dalam pelayan, lebih evisien dalam sumber daya, lebih produktif dalam bekerja dan lebih efektif dalam mencapai target kinerja (H. M. A. Abdullah, 2010; M. A. Abdullah, 2017). Kementerian Agama RI sebagai induk UIN juga memberikan dukungan besar supaya UIN dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, termasuk sarana dan prasarana (Ismail, 2017).

Misi integrasi keilmuan UIN pada dasarnya selaras dengan pengembangan keilmuan di dunia global, yang telah memberikan fakta bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat, cepat, dan meluas ketika setiap bidang atau disiplin ilmu terjadi dan melakukan harmonisasi dan integrasi (Nancy G Gleson. (2018)., 2018; Schwab, 2016, 2019). Perguruan tinggi di dunia saat ini secara umum meneguhkan diri pada pola integrasi antar disiplin ilmu dan kajian (Edward, 2018). Transformasi kehidupan dan dunia kerja yang menakjubkan di awal revolusi industri 4.0 merupakan bukti pentingnya inovasi dan kesalingtergantungan antar disiplin ilmu dan teknologi, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang nyata pada kemanusiaan (Schwab, 2016, 2019). UIN adalah bentuk nyata dari cara berbenah PTKI supaya bertahan, berkembang, dan antisipatoris (Muchori, 2001) dan tidak terdisrupsi (Kasali, 2016).

Tantangan terbesar UIN adalah bagaimana memiliki konsep integrasi keilmuan, antar bidang studi Islam, dan dengan ilmu umum (humaniora dan sains). Hal ini dapat dipahami karena relasi antar bidang studi Islam dan umum memiliki sejarah penuh dinamika baik positif maupun negatif dalam konteks agama-agama di dunia, termasuk di Indonesia. Relasi agama dan ilmu yang positif, keduanya saling mendukung dan menguatkan, sebaliknya relasi yang negative menyebabkan saling meniadakan Secara umum relasi agama dan ilmu pernah bahkan masih ada dalam kondisi konflik, keterpisahan-kemandirian, sampai pada relasi yang lebih konstruktif, percakapan-dialog dan integrasi. UIN adalah PTKI yang memiliki mandate integrasi keilmuan, yang berada pada level percakapan-dialog dan integrasi.

Untuk menggerakkan UIN supaya dapat membangun relasi antar bidang ilmu Islam dan umum yang lebih konstruktif dibutuhkan metodologi keilmuan yang bersifat historis, terbuka, mendasar, dan open ended. Cara pandang ini yang menyebabkan dalam studi keislaman mengalami pergeseran; pertama, filologis-orientalistik; kedua, fungsionalis-modernis; dan ketiga hermeneutik-interpretative (A. Abdullah et al., 2014; M. A. Abdullah, 2017; Azra, 2010, 2013; Suprayogo, 2010). UIN memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan pergeseran dari ideologis (ideology tertutup) ke keilmuan (scientific-terbuka) dengan pendekatan multi dan interdisiplin; dari studi keislaman dikotomis-atomistik, normativitas-dogmatis ke historisitas-integrasi-interkoneksi (A. Abdullah et al., 2014; M. A. Abdullah, 2012, 2017).

Integrasi-interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora). Beberapa UIN telah memiliki konsep integrasi keilmuan ini, diantaranya; UIN Yogyakarta menggunakan paradigma Jaring Laba-laba keilmuan Teoantroposentrik-integralistik; UIN Malang dengan paradigma Pohon Ilmu Integrasi Keilmuan; UIN Jakarta dengan paradigma reintegrasi; UIN Bandung dengan paradigm Roda Ilmu Wahyu memandu Ilmu; UIN Makassar dengan paradigm Rumah Peradaban; UIN Surabaya dengan paradigm Menara Kembar Tersambung dengan Jembatan; UIN Semarang dengan paradigm Intan Berlian Ilmu; UIN Banten dengan paradigm Integrasi-Komparasi-Difusi; UIN Mataram dengan paradigm Horizon Ilmu; dan UIN Padang dengan sarang lebah.

Namun demikian, meskipun integrasi keilmuan merupakan core value semua UIN, kenyataannya hingga saat ini belum semua UIN tuntas dalam membangun paradigma integrasi keilmuan, dan masih pada konsep besar yang belum operasional (Rifai et al., 2014; Saifuddin et al., 2019). Masalah mendasar yang masih dihadapi UIN diantaranya; *Pertama,* pembahasan epistemologi baru berada pada tataran teori dan belum banyak yang berlanjut pada tataran teknis-praktis. *Kedua,* batas-batas operasional dan definisi pendekatan integrasi yang bisa diterima bersama. *Ketiga,*  elaborasi konsep integrasi ilmu dalam tatanan kurikulum pembelajaran. *Keempat*, tahapan pelaksanaan integrasi ilmu pada tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tampaknya untuk membangun konsep integrasi keilmuan yang bisa diterima semua pihak, tidaklah mudah. Menyadari hal itu, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019. Dalam pedoman ini memberikan rambu-rambu paradigma integrasi keilmuan di UIN Setidaknya memiliki enam prinsip dasar dalam membangun konsep maupun implementasi integrasi ilmu PTKI, yaitu intelektualisme, inteligensia, keterbukaan, kekinian, keindonesian, dan kesalehan (Saifuddin et al., 2019). Intelektualisme adalah sikap mental dan kapasitas penguasaan dan penghormatan atas reason, fakta dan logika yang membentuk penguasaan metodologi dan konstruksi ilmu yang memadai. Intelegensia adalah sikap mental terdidik yang memiliki perhatian pada nasib masyarakat dan lingkungan. Keterbukaan adalah sikap mental yang siap menerima perubahan dan sikap toleran terhadap sesama. Kekinian mengacu kepada perhatian akan pentingnya relevansi perguruan tinggi dengan tuntutan zaman, keindonesiaan adalah nasionalisme yang diekspresikan melalui rasa cinta tanah air, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ikut bertanggung jawab akan kemajuan bangsa. Terakhir, kesalehan adalah sikap mental menjaga nurani, ketaatan kepada ajaran agama, dan orientasi berbuat baik dalam kehidupan.

Secara epistimologi, konsep integrasi keilmuan di UIN telah ada, bahkan Kementerian Agama telah memberikan pedoman implementasi. Tantangan yang paling besar bagi UIN sesungguhnya adalah bagaimana mengoperasionalisasikan konsep integrasi keilmuan dalam bentuk kurikulum dan pembelajaran. Studi pedahuluan yang saya lakukan dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis kepada 75 dosen UIN menunjukkan bahwa, dosen memiliki keragaman pemahaman tentang integrasi keilmuan. Kurikulum yang disediakan masing-masing UIN dinilai belum bisa memandu untuk pembelajaran berpendekatan integrasi keilmuan. Saya juga menemukan tiga model cara dosen mengajar dengan pendekatan integrasi keilmuan; *Pertama,* tektualisasi-konteks. *Kedua,* kontekstualisasi-teks. Ketiga, integrasi-dialogis: teks-konteks dan konteks-teks.

Berdasarkan tantangan dan fakta di atas, maka penting dilakukan analisis kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN. Karena kurikulum merupakan perangkat mutu akademik yang berfungsi sebagai *blue print* dan penunjuk arah penyelenggaraan universitas (program studi). Apalagi usia UIN tahun depan tepat 20 tahun sejak diresmikan pertama kalinya tahun 2002, sehingga tepat untuk dilakukan eksplorasi secara mendalam.

* + - 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, baik secara konseptual maupun praktik di lapangan, termasuk studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan kebijakan integrasi keilmuan di UIN, yaitu;

1. Belum semua UIN memiliki konsep integrasi keilmuan, sementara secara kelembagaan telah terlanjur berubah dari IAIN menjadi UIN dengan misi integrasi keilmuan.
2. Konsep integrasi keilmuan di UIN dipahami dan dirumuskan secara berbeda-beda oleh civitas akademika UIN sehingga tampak sangat beragam.
3. UIN yang telah memiliki konsep epistimologi integrasi keilmuan, ternyata belum semuanya diturunkan pada tahapan implementasi seperti kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Konsep Tri Dharma perguruan tinggi di UIN masih terpisah-pisah, belum ada konsep umum yang mengatur Tri Dharma sebagai satu kesatuan dalam integrasi keilmuan.
5. Semua STAIN/IAIN berusaha untuk berubah menjadi UIN.
6. UIN membuka prodi agama dan prodi umum dengan sumber daya manusia dan finansial yang terbatas.
7. Sumber dana UIN yang terbatas hanya dari Kementerian Agama RI menyulitkan UIN dalam mengembangkan program studi terutama program studi umum.
   * + 1. **Fokus dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka fokus penelitian ini adalah melakukan analisis kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulun Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan (FITK) UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang meliputi;

1. Menemukan permasalahan kebijakan integrasi keilmuan dalam bidang kurikulum.
2. Merumuskan masalah kebijakan (menyusun agenda kebijakan) untuk menemukan model integrasi keilmuan dalam kurikulum.
3. Menyusun peramalan, pengembangan alternatif kebijakan, dan membuat rekomendasi kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum

Berdasarkan fokus permasalah di atas, maka rumusan masalah dalam analisis kebijakan ini dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Apa masalah kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN?
2. Alternatif kebijakan apa saja yang diusulkan dalam kurikulum integrasi keilmuan di UIN?
3. Bagaimana isi rekomendasi integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN?
   * + 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah;

1. Mendapatkan informasi dan pemahaman tentang masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN.
2. Mendapatkan informasi dan rumusan alternative-alternatif kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN
3. Mendapatkan informasi dan rumusan tentang rekomendasi kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN
   * + 1. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tujuan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah;

1. Bagaimana kebijakan akademik saat ini di 3 UIN di Indonesia
2. Bagaimana model Budaya akademik yang cocok di 3 UIN.
3. Alternatif kebijakan apa saja yang direkomendasikan untuk 3 UIN?
4. Apa isi kebijakan yang direkomendasikan?
   * + 1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada;

1. Kementerian Agama
2. Dapat mengetahui kinerja UIN
3. Dapat meningkatkan kualitas kurikulum UIN.
4. Dapat meningkatkan kualitas kebijakan UIN.
5. Dapat meningkatkan mutu evaluasi.
6. UIN
7. Dapat meningkatkan kinerja dosen.
8. Dapat meningkatkan kualitas kurikulum.
9. Dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran lebih baik.
10. Dapat meningkatkan mutu pembelajaran.
11. Dapat menjadikan informasi dan masukan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut.
12. Dosen
13. Dapat meningkatkan profesionalisme.
14. Dapat memperbaiki kinerja.
15. Dapat memperbaiki metode pembelajaran.
16. Dapat meningkatkan pemahaman integrasi keilmuan.
17. Mahasiswa
18. Dapat memahami integrasi keilmuan.
19. Meningkatkan motivasi belajar.
20. Mengetahui kinerja tempat studi

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

* + - 1. **Kajian Teori**

Kajian teori untuk memberikan bingkai teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam disertasi berjudul *Analisis Kebijakan Integrasi Keilmuan dalam Kurikulum di Universitas Islam Negeri.* Teori yang digunakan sebagai grand teori dalam penelitian ini adalah teori kebijakan public dan analisis kebijakan integrative. Teori ini digunakan karena ruang lingkup teori ini berguna untuk memahami arti, dimensi, tahapan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga memiliki akurasi yang baik.

Kajian teori ini selain membahas grand teori, juga mengkaji teori-teori lain yang terkait dengan analisis kebijakan, seperti integrasi keilmuan, universitas Islam, kebebasan akademik, dan kurikulum. Berikut akan dijelaskan secara komprehensif grand teori dan teori aplikatif yang berkaitan dengan penelitian ini.

* + 1. **Kebijakan Publik**

1. Pengertian Kebijakan Publik

Public policy is whetever goverments choose to do or not to do (kebijakan public adalah apapaun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Dye, 1981: 1). Kebijakan public dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah boleh memilih melakukan dan tidak melakukan. Kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Anderson, 1979: 3). Meskipun dibuat pemerintah dalam membuat analisis kebijakan dipengaruhi banyak factor, actor diluar pemerintah. Karena kebijakan public masuk dalam ranah social politik yang memiliki nilai-nilai. Ketika pemerintah membuat kebijakan public maka ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setipa kebijakan mengandung seperangkat nilai-nilai (Dyne; 1981; 3).

Karena itu kebijakan public tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik social politik yang ada di masyarakat. Jika tidak demikian akan mendapatkan resistensi dalam implementasinya (Subarsono, 2008: 3; Fishr, Miller, Sidney, 2015). Maka tidak berlebihan jika studi kebijakan disebut sebagai pendekatan riset evaluasi sejati karena berketetapan untuk mengidentifikasi dan menilai demi masyarakat kelebihan berbagai kebijakan yang saling berkonpetisi (Hadi, 2011; 141).

1. Fokus dan Pendekatan Kebijakan

Fokus utama kebijakan public ada lima yaitu; Penyusunan agenda kebijakan, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan.

Pendekatan yang digunakan dalam studi kebijakan public ada dua yaitu; 1. Analisis kebijakan (policy analysis) dan kebijakan public politik (political public policy) (Nughes, 1994: 145).

Analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan metode statistic dan matematika yang canggih. Kebijakan public politik lebih menekankan pada hasil dan outcame dari pada penggunaan metode statistic, dengan melihat interaksi politik sebaga factor penentu dalam berbagai bidang pendidikan (Subarsono,2008:3). Analisis kebijakan dengan matematik tidak realistis dan tidak rasional karena kurang mampu menyentuh realitas social yang berada dibalik fakta. Kebijakan pulbil politik lebih rasional dalam bidang social karena mampu menyelami lebih dalam tentang nilai, praktik social yang hidup dan masyarakat yang menjadi subyek penelitian, karena analis kebijakan selalu dihadapkan dengan konflik anlternatif antara pertimbangan teknis dan politik (Patton & Sawicki, 1986; 25). Dalam analisis kebijakan lebih dominan menggunakan kegiatan politis. Proses analisis kebijakan public adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakuka dalam prose skegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik ada dalam serangkaian kegiatan dari penyusuanan agenda, frmulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan pilaian kebijakan (Subarsono 2008; 8).

* + 1. Penelitian kebijakan

1. Pengertian penelitian Kebijakan

Keberhasilan kebijakan disebabkan oleh factor dan actor. Kurang tersedianya data dan informasi dalam proses menganalisis sebuah kebijakan (Sudarwan Danim (2005:vii). Maka penelitian kebijakan dalam proses analisis kebijakan sangat penting. Karena menyediakan data dan informasi yang memadai bagi analisis untuk memilih alternative kebijakan yang tepat. Kebijakan tanpa dukungan informasi dan data yang cukup dari hasil evaluasi yang mandiri, bukan hanya tidak efektif melainkan dapat melahirkan praktek kebijakan yang kurang manusiawi, bahkan mengundang masalah yang lebih besar (Sudarwan,; 2005, viii). Maka dalam penelitian analisis kebijakan hal yang pertama dilakukan adalah melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi secara akurat dan bermanfaat untuk menafsirkan keberhasilan suatu program, dan sebagai bahan untuk membuat keputusan baru (Kartowagiran, 2013; 14).

Maka penelitian kebijakan dalam proses analisis kebijakan sangat penting. Karena penelitian kebijakan mampu menyediakan data dan informasi yang memadai bagi analisis untuk memilih alternative kebijakan yang tepat dalam membuat kebijakan.

Process of conducting research on, or analysys of, a fundamental social problem in order to provide policy maker with pragmatic, action oriented recommendations for alleviating the problem (Majchrzak;1984, 12). Proses penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah social yang fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebeijakan dalam memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi kepada tindakan atau tingkah laku yang prakmatik.

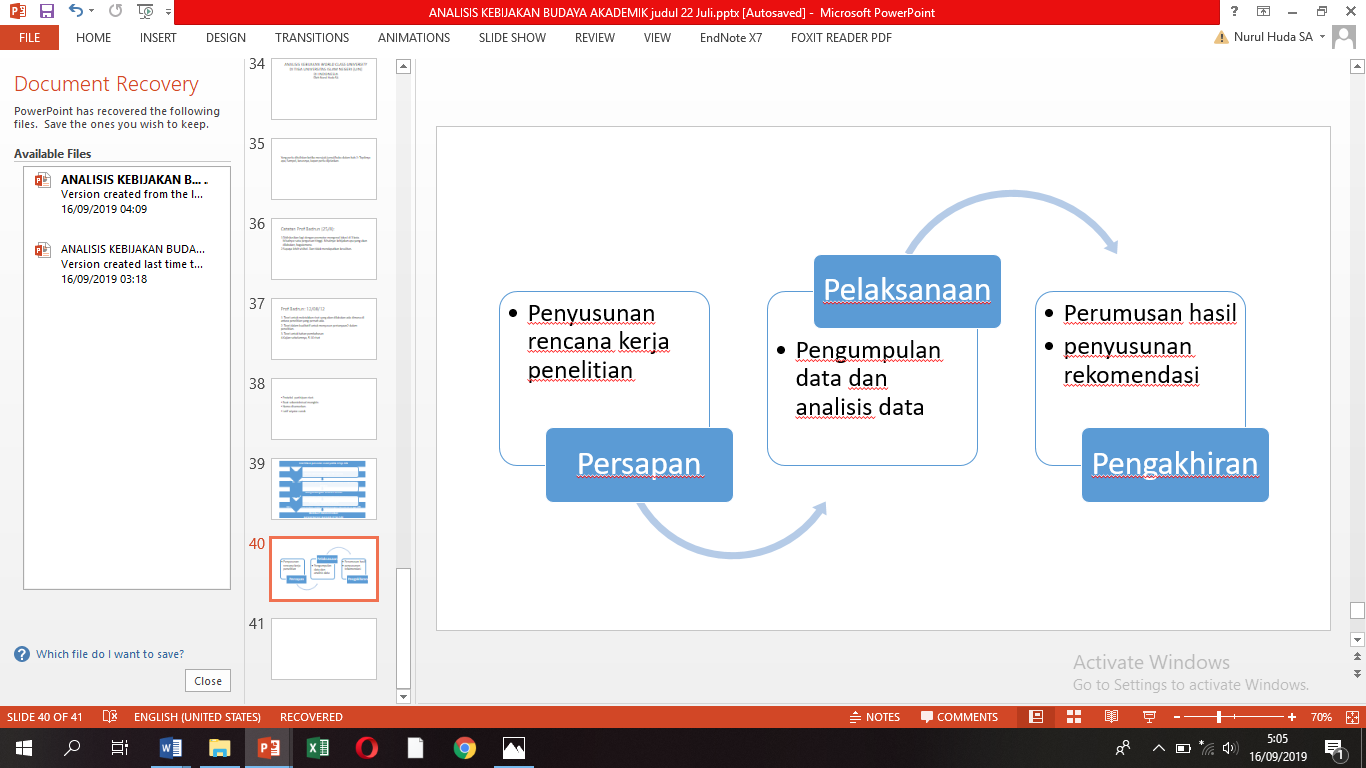
Penelitian kebijakan memiliki kekhususan dibandingkan dengan model penelitian yang lain seperti pada tujuan, terminology, cara kerja dan hasil atau kriteria keberhasilan. Hasil akhir penelitian kebijakan adalah rekomendasi yang akan dipakai para pengambil kebijakan Dilihat dari hasil maka peneltian kebijakan termasuk pada penelitian terapan, karena bersifat praktis, pragmatis dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah bagi pengambil kebijakan.

Peneltian sama secara metodologis sama tetapi memiliki kekhasan mulai dari tujuan, terminolohi yang digunakan, proses kerja dan kriteria keberhasilannya. Pemahaham social politik ekonomi, dan persoalan lokalitas mutlak dibutuhkan supaya mampu mengungkapkan berbagai data yang fundamental (Nugroho, 2003: 83-85).

Tujuan akhir penelitian kebijakan adalah data dan informasi yang akurat dalam bentuk alternative-alternatif rekomendasi yang akan dipakai para analisis untuk menetapkan kebijakan. Maka penelitian kebijakan termasuk penelitian terapan, dapat digunakan secara langsung oleh pengambil kebijakan (Nugroho, 2003: 87).

1. Konteks Penelitian Kebijakan

Fokus penelitian kebijakan yang sering dilakukan adalah masalah social, pendidikan, politik, ekonomi hokum, dan kebudayaan. Kontek penelitiannya adalah bagaimana memecahakan berbagai masalah social yang dihadapi masyarakat (public) melalui kegiatan pengumpulan data, menganalisis, dan melakukan interpretasi terhadap data tersebut khususnya mengenai prilaku social. Tahapan penelitian kebijakan sebagai berikut;



1. Karakteristik Penelitian Kebijakan

Karakter penelitian kebijakan 1. Is multidimensional 2. Use an empiricop inductive research 3. Responds to study user 4. Explicity incoperates value (Majchrzak;1984, 18).

Multidimensi, penelitian kebijakan seorang peneliti harus melihat permasalahan social dan penyelesaian masalah tersebut, dengan menggunakan berbagai dimensi, factor, peristiwa, efek sehingga memiliki hasil yang akurat. Empiris induktif. Penelitian kebijakan harus dimulai dari memahami berbagai permasalahan social secara empiris, fakta social, kemudian disusun konsep atau teori kausal yang merupakan bagian dari kajian perkembangan dari masalah yang diteliti tersebut. Focus pada variabel lunan (smalleble variable) dan, tujuannya adalah membantu para birokrat dalam membuat keputusan (berorentasi pada user), merespon pemakai kebijakan.

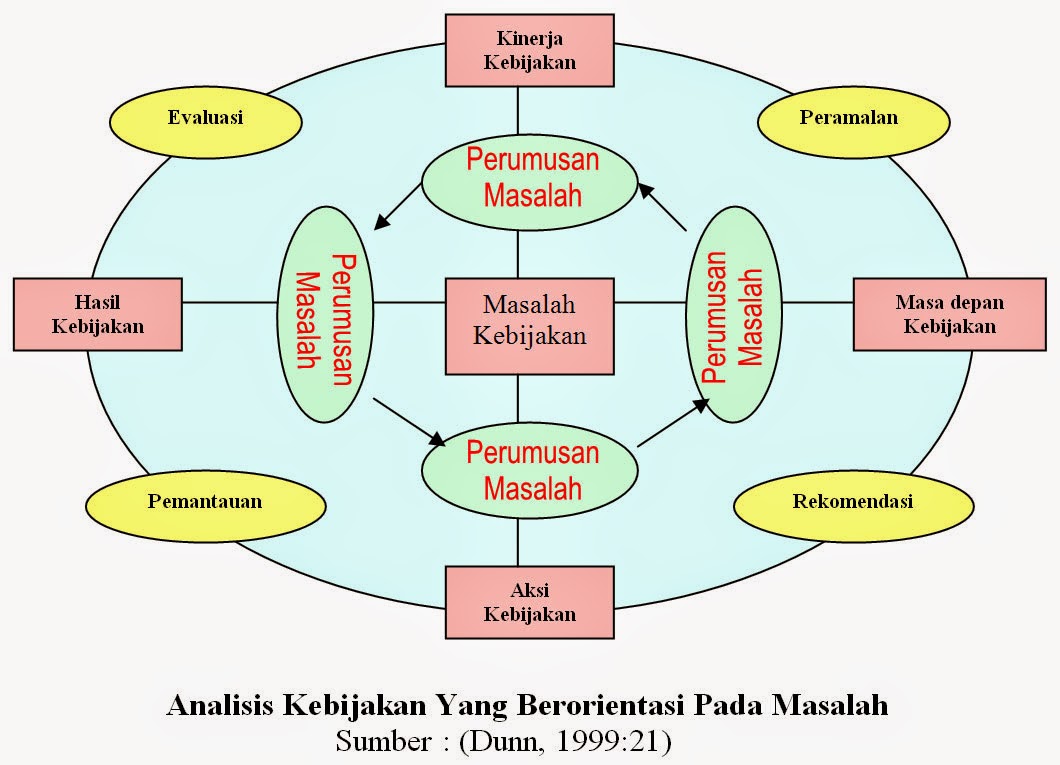
1. Langkah-Langkah Penelitian Kebijakan

Lima langkah dalam penelitian kebijakan (Majchrzak;1984, 20).

1. Preparation (persiapan). Melakukan identifikasi terhadap fenomena lingkungan social politik terutama ditingkat local dan khas.
2. Conceptualization (konseptualisasi studi): mengembangkan model yang diangkat dari lingkungan social politik dan permasalahan social politik local dank has tersebut. Merumuskanpertanyaan penelitian serta memilih tim peneliti.
3. Technical analysis (analisis technical) upaya menguji berbagai factor yang menyebabkan munculnya fenomena lingkungan social politik beserta permasalahan yang timbul.
4. Recomemendations analysis: membuat aalternatif rekomendasi.
5. Communication: mengkomunikasikan ke pengguna.
   * 1. Analisis Kebijakan
6. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah kajian terhadap kebijakan public yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontektualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan (Parsons, 2005). Analisis kebijakan menurut Wildavsky (1979) adalah sub didang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan berdasarkan disiplin yang terbatas, tetapi dengan segala sesuatu yang tampaknya sesuai dengan situasi dari masa dan hakekat dari persoalannya (Parsons, 2005). Analisis kebijakan adalah ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah yang mungkin timbul akibat penerapan suatu kebijakan (Dunn, 1991; 14). Analisis kebijakan menurut Sheafor, Horejsi dan Horejsi adalah usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekwensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (Soeharto, 2004; 85).

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen informasi kebijakan yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan. Informasi dan prosedur bersifat saling tergatung; mereka terkait di dalam proses dinamis transformasi kebijakan. Maka komponen informasi kebijakan seperti masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan ditransformasikan dari satu ke yang lainnya dengan mengggunakan prosedur analisis kebijakan. Semua proses diatur melalui perumusan masalah yang diletakkan pada pusat kerangka kinerja kebijakan. Kerangka tersebut tergambar sebagai berikut;

**Gambar I:** Analisis Kebijakan berorientasi Masalah (Dunn, 1994: 149)

Analisis terdiri dari rangkaian aktifitas pada spektrum pengetahuan dana (in) proses kebijakan; penegtahuan untuk (for) proses kebijakan, dan pengetahuan tentang (about) proses kebijakan (Parsons; 2005). Secara definitive penetapan variasi ini dalam sebuah kontimum;

Analisis kebijakan analisis untuk kebijakan

1 2 3 4

**Analisis determinasi kebijakan** Analisis isi kebijakan **Monev kebijakan informasi utnuk kebijakan 5. Advokasi kebaijakan. Nomo 4-5 analisis untuk kebijakan.**

**Analisis determinasi kebijakan: analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebiajkan, mengapa, kapan dan untuk siapa kebiajkan dibuat.**

**Isi Kebijakan: deskripsi tentang kebijakan ertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya, atau analisis didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memeberikan kritik terhadap kebijakan.**

**Monitoring evaluasi mengkaji bagaimana kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan dan apa dampak kebijakan terhadap suatu persoalan tertentu.**

**Analisis untuk kebijakan ada 2:**

**Advokasi kebijakan: berupa riset dan argument untuk memengarugibagenda kebijakan di dalam atau di luar pemerintahan.**

**Informasi utnuk kebijakan: analisis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi aktifitas pembuatan kebijakan. Bisa berbentuk riset eks/internal yang terperinci tentang aspek kualitatif dan judgmental dari suatu kebijakan.**

Analisis kebijakan dalam arti paling mendasar dan ortodok dimaksudkan untuk meningkatkan metode untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan, menentuan tujuan, mengevaluasi alternative pilihan memilih alternative dan mengukur kinerja (Parson, 2005).

Analisis kebijakan akademik di UIN bermula dari berbagai masalah, seperti konsep kebebasan (mimbar) akademik yang berbeda-beda. Implementasi kebebasan (mimbar) akademik yang berbeda-beda. Semua PTKIN berusaha untuk menjadi UIN. PTKI banyak yang membuka prodi agama dan umum. Konsep integrasi keilmuan belum dimiliki oleh semua PTKI. PTKI yang telah memiliki konsep integrasi keilmuan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Konsep integrasi yang berbeda-beda antar PTKI(N). Integrasi keilmuan belum terimplementasikan dalam manajemen dan akademik. Konsep tridharma perguruan tinggi di PTKI belum terintegrasi. Lahirnya PP 46 Tahun 2019 akan memunculkan kontradiksi dengan Kepres tentang pembentukan UIN.

1. **Prosedur Analisis Kebijakan**

Proses analisis kebijakan adalah aturan untuk menghasilkan berbagai informasi kebijakan antara lain masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan (Dunn, 2000; 21). Ada lima langkah dalam proses kebijakan (Dunn, 2000; 21), yaitu;

Pertama, perumusan masalah. Langkah ini dapat memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asusmsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting).

Kedua, peramalan kebijakan menyedikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative kebijakan termasuk tidak melakukan sesuatu yang dilakukan pada tahap formulasi kebijkan.

Ketiga, rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atu biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan, yang akan membatu pengamblan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan tanggungjawab administrative bagi implementasi kebijakan.

Keempat, pemantauan kebijakan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijkan yang diambil sebelumnya sehingga membantu pengambil keputusan pada tahap rencana implementasi kebijakan.

Kelima, penilaian membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakana yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Langkah penilaian membantu pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang akan diberlakukan. Penilaian menghasilkan kesimpulan, menyelesaikan masalah, klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta merupakan dasar perumusan kembali masalah yang lain. Proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik tampak dalam serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktifitas perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas intelektal. Berikut adalah gambaran kedekatan hubungan proses analisis dan prosedur kebijakan dengan pembuatan kebijakan;

1. **Model Analisis Kebijakan**

Ada tiga model analisis kebijakan (Dunn; 1991; 51-54) yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integrative. Analisis kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum di UIN ini menggunakan model analisis integrative yaitu gabungan antara model prospekif dan retrospektif.

1. Model analisis prospektif

Model analisis kebijakan prospektif adalah bentuk analisis uyang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsewensi kebijakan integrasi keilmuan dalam bidang kurikulum yang terjadi sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul terhadap suatu kebijakan yang akan diusulkan.

1. Model analisis Introspektif

Model analisis Introspektif adalah analisis yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluastif, karena melibatkan pendekatan evaluative terhdapa dampak-dampak yang sedang diterapkan di UIN.

1. Model analisis integratif

Model analisis integrative adalah model analisis yang memadukan kodel prospektif dan model retrospektif. Model ini disebut hilistik atau komprehensif. Model ini dilakukan terhadap konsekwensi yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dilakukan. Alur hubungan antara model analisis kebijakan pprospektif, retrospektif dan integrative dapat dilihat dalam gambar berikut;

Pada langkah-langkah penelitian ini analisis kebijakan akademik dilakukan terhadap keterlaksanaan kebijakan yang sudah diimplementasikan untuk diberikan pendapat oleh peneliti tentang kelayakan kebijakan tersebut. Peneliti juga mengusulkan rususan alternative-alternatif kebijakan yang dimintakan pendapat persetujuannya kepada stakeholder.

1. Sistem Analisis kebijakan

*The product of policy analysis is advice, specifically, it is advice that inform some public policy decition* (Weimer dan Vining, 1998; 1). Produk kebijakan public bersifat rekomendasi, nasehat, bahan pertimbangan, mulai dari masalah, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi public sampai pada alternative-alternatif kebijakan yang dianggap tepat.

Tujuan analisis kebijakan public adalah memberi rekomendasi pada pembuat kebijakan (policy makers), karena itu analisis kebijakan public harus berpijak pada berbagai permasalahan public sehingga hasilnya berbentuk rekomendasi kebijakan. Bentuk kebijakan public (Dunn, 1994: 17): Analisis kebijakan prospektif; Retrospektif; dan Terintegrasi.

Dalam sistem analisis kebijakan, pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan masalah kebijakan. Tahapan merumuskan kebijakan public, dengan pola sebagai berikut;

1. Pencarian masalah: perumusan masalah diawali dengan adalanya situasi masalah. Situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian analisis terlibat dalam pencarian masalah, yang melahirkan meta masalah (masalah yang belum tertata rapi).
2. Pendefinisian masalah : Dari meta dilakukan pendefinisian secara umum seperti malasah konomi, politik, budaya, dari potongan2 itu melahirkan masalah substantive.
3. Spesifikasi masalah: dari masalah substantive menjadi masalah formal, masalah yang sudah didefenisikan secara spesifik dan jelas.
4. Pengenalan masalah: menemukan situasi masalah yang diperoleh dari hasil perumusan masalah yang dilakukan secara spesifik dan jelas (Subarsono, 2008; 29).
5. Peramalan Kebijakan

Peramalan adalah tahap dari analisis kebijakan, yaitu melakukan penelitian masa depan yang akan dicapai serta kemampuan dari setiapa alternative kebijakan untuk mencapai masa depan tersebut. Tujuan peramalan adalah untuk memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekwensinya. Melakukan control, intervensi guna mempengaruhi perubahan sehingga akan mengurangi resiko yang lebih besa (Subarsono, 2008: 30).

Tiga macam peramalan: 1. Proyeksi: ramasalan berdasarkan estrapolasi. Ramalan berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan asumsi masa depan punya pola yang sama. 2. Prediksi. Ramalan berdasarkan asumsi teoritik. Seperti teory supply dan deman, dimana harga normal akan dicapai titik temu antara supply dan deman. 3. Perkiraan. Perkiraan dari pakar tentang siatuasi masayarakat yang akan datang. Jenis masa depan: masa depan potensial (yang mungkin terjadi) seperti penebangan terus menerus maka akan mungkin terjadi bencana alama, kekurangan air, panas tinggi. Masa depan masuk akal, masa depan akan terjadi jika tidak diambil kebijakan sekarang. Masa depan normative, seharusnya terjadi, seperti pupuk 1 ha mengahsilkan sekian ton. Objek peramalan: 1. Konsekwensi kebijakan sekarang. Ramalan mengestimasi masa depan jika tidak diambil kebijakan baru. 2. Konsekwensi kebijakan baru, mengestimasi masa depan jika digunakan kebijakan baru. 3. Isi kebijakan baru, mengestimasi perubahan dalam isi kebijakan baru. 4. Perilaku stake holder, ramalan mengestimasi dukungan/penolakan yang mungiin akibat kebijakan baru (Subarsono, 2008: 50-58).

1. Pengembangan Alternatif Kebijakan

Tahap berikutnya dalam proses kebijakan public adalah pengembangan alterative kebijakan dan menentukan kriteria seleksi terhadap berbagai alternative yang ditawarkan. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang telah lolos dari proses seleksi karena dipandang lebih unggul dibandingkan kebijkan lain, dengan kriteria yang jlas (Subarsono, 2008: 53).

Ada 6 metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan alternative kebijakan; 1. Metode status quo. Metode ini melihat apakah kebijakan yang sudah ada dapat menyelesaikan masalah. Sehingga apabila ada usulan kebijkan baru perlu dievaluasi terlebih dahulu. 2. Metode survey. Dengan menayakan kolega sejawat mengenai suatu masalah dan bagaimana pemecahan masalah menurut mereka. 3. Metode tinjauan pustaka, berbgai sumber pstaka untuk alternative kebijakan. 4. Perbandingan dengan pengalaman. Jika permasalahan dan setting sama, maka dapat digunakan kebijakan yang pernah ada. Seberapa jauh keberhasilannya dapat memeberikan gambaran tentang kualitas suatu kebijkana. 5. Metode analogi, metaphor dan sintetik. Analog dan metaphor untuk digunakan dalam mendefinisikan masalah dan menentukan alternative kebijakan. Sintetik metode pemecahan masalah dengan cara diskusi kelompok, sehingga diharapkan muncul banyak alternative pemecahan masalah. 6. Curah gagasan, mirik sintetic minta pendapat pakar, konsultan, kolega mengenai masalah yang akan dipecahkan, sehingga memunculkan alternative kebijakan (Patton dan Sawicki, 1987: 182-185).

Dalam memilih alternative kebijakan ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan; 1, kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. 2. Dapat diimplementasikan. 3. Mampu mempromosikan pemerartaan dan keadilan 4. Mendasarkan pada penilian yang jelas dan transparatan.

1. Rekomendasi Kebijakan

Setelah memilih alternative kebijakan maka membuat rekomendasi. Rekomendasi kebijkan adalah tujuan utama analisis kebijakan. Tujuan rekomendasi kebijakan adalah memebrikan alternative kebijakan yang paling unggul dibandingkan yang lain. Rkomendasi adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap alternative-alternatif kebijkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Model rekomendasi kebijkaan (Subarsono 2008; 66): 1. Metode perbandingan. 2. Metode memuaskan 3. Lexicographic ordering method, Semua alternative kebijakan dibandingkan dan dirangking. 4. Non dominated alternativnes Method. 5. Mtode may. 6. Metode pro kontra. 7. Analisis biaya dan manfaat. 8. Pohon kepuasan. 9. Teori profit. 10. Ranking by inspection.

1. Implementasi kebijakan.

Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan yang diambil dari rekomendasi. Hasil analisis kebijakan diimplementasikan. Rekomendasi yang baik belum tentu dapat diimplementasikan dengan baik.

Tahapan yang harus dilalui dalam implementasi kebijakan (Subarsono, 2008; 69): 1. Pengesahan undang-undang 2. Pelaksanaan kebijakan oleh organisasi pelaksana. 3. Kesediaan dari stokeholder untuk melaksanakan kebijkan. 5. Dampak kebijkan baik posisif negative 6. Harapan dari organisasi pelaksana. 7. Upaya refisi kebijkan/undang-undang yang berkaitan dengan kebijkana.

1. Pemantauan Kebijakan

pemantauan adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari kebijkan public. Karena kemungkinan analis kebijakan mendiskripsikan hubungan antara operasi program kebijankan dan hasilnya maka pemantauan merupakan sumber informasi utama tentang ilmpementasi tersebut (Dunn, 1994: 509).

Tujuan utama pemantauan adalah; 1. Compliance, kesesuaian/keathan) apakah implementasi sesuai dengan standart dan prosedur. 2. Auditing, pemeriksaan, apakah sumber-sumber pelayanan terhadap kelompok sasaran sudah tepat sasaran. 3. Accounting (akuntansi) apakah ada perubahan social ekonomi setelah implementasi. 4. Eksplanasi, pemantauan, proses menghimpun informasi yang dapat menjelaskan tentang mengapa hasil-hasil kebijkan public dan program berbeda (Dunn, 1994: 510).

1. Evaluasi Kebijakan
   * 1. Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah kebijkaan (Dunn, 1994: 608). evaluasi menunjuk pada skal nilai yterhadap hasil kebijkan dan program. Evaluasi dapat disebut dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Fungsi utama evaluasi: memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijkan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public. 2. Sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. 3. Sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijkan lainna termasuk perumusan masalah dan ekomendasi (Dunn, 1994: 610-611).
     2. Universitas Islam

Pendidikan tinggi Islam pada mulanya di dorong beberapa tujuan, yaitu pertama, melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam yang lebih tinggi, sistematis, dan terarah. Kedua, untuk melaksnakan pengembangan dan penngkatan dakwah islam. Ketiga, reproduksi kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan baik di birokrasi Negara, swasta, lembaga sosial, dakwah, dan pendidikan (Azra, 1999: Furchan, 2005: 9).

Dalam sejarah pengembangan pendidikan Islam (terutama perguruan tinggi Islam) di dunia menegaskan bahwa kemajuan terbaik selalu didapatkan ketika perguruan tinggi menempatkan konsep dan implementasi keilmuan yang integratif-non dikotomik (Mas’ud, 2007; 7). Pendokotomian ilmu agama-umum tidak akan dapat melahirkan manusia kompetitif, yang dapat berkiprah di seluruh bidang kehidupan dengan keahlian yang dimilikinya (Furchan, 2005: 15).

Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah yang didirikan Khalifah Al-Ma’mun Ibn Harun Al-Rasyid tahun 830 M, adalah lembaga pendidikan tinggi di dunia pertama yang mencapai puncak keemasan, karena mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara sistematis dan integrative, dengan sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang memadai (Azra, 1998; 55). Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas al-Zaitunah di Tunis, Universitas al-Qarawiyyin di Fez, dan Universitas Cordova di Andalusia, adalah beberapa contoh lain bagaimana Universitas Islam mengalami pasang ketika mengembangkan konsep integrasi keilmuan (dengan keragamannya masing-masing), dan mengalami kesurutan ketika menempatkan ilmu secara dikotomik (Rijal, 2016; 66-69).

Lebih dari itu, melalui institusi pendidikan tinggi Islam ini bisa menjadi ajang ideologisasi keislaman tertentu, seperti dalam kasus di Universitas Islam Madinah Arab Saudi berfaham Salafi Wahabi, Universitas Al-Mustafa, Qum, Iran berfaham Syiah, dan Universitas Al-Azhar Mesir yang mengembangankan Islam Wasatiyah (Keiko, 2015). Dalam konteks pendidikan tinggi transnasional yang ada di Indonesia, LIPIA dan STF Sadra, keduanya mengembangkan ideology asal negara masing-masing yakni, Salafi dan Syiah (Muhtarom, 2019).

Perguruan tinggi di Indonesia merupakan *private good,* karena tidak termasuk dalam kebijakan program wajib belajar, karena itu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan tinggi harus membiayai sendiri, sementara Negara sifatnya memberi subsidi dan meringankan (Suyanto & Abbas, 2004; 167-169). Salah satu *core* utama perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi) adalah bidang akademik. Tugas utama perguruan tinggi adalah memperkuat kemampuan akademik dan penelitian yang kreatif (Nagai, 1993; 66-69). Bidang akademik merupakan jiwa bagi perguruan tinggi yang harus dikembangkan secara terus menerus (Abdullah, 2005; 69), mengembangkan tradisi akademik merupakan bagian pokok pada perguruan tinggi (Aziz, 2016: 176). Perguruan tinggi merupakan tempat berkumpul dan berinteraksinya komunitas ilmiah-akademik dalam rangka mencari kebenaran akademik sekaligus mengembangkan kapasitas diri yang dimiliki masing-masing civitas akademika (Nugroho, 2006; 155). Pencarian kebenaran tersebut bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kepentingan kemanusiaan dan pengembangan peradaban manusia (Abdullah, 2010; 3). Perguruan tinggi adalah kekuatan moral, tempat produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Perguruan tinggi adalah rumah tempat berkumpul para ilmuwan untuk mempertimbangkan masa depan umat manusia yang sangat tergantung pada perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Iriyanto; 211).

Muncul kecenderungan baru seperti dalam merespon perkembangan seperti; Pertama, studi keislaman yang mengarah kepada non madhabi sehingga menghasilkan pemudaran sektarianisme. Wujudnya dalam perkualiahan perbandingan madhab, masail figh, pemikiran dalam Islam (Ilmu kalam, filafat Islam, Tasawuf) dan perkembangan pemikiran modern dalam islam. Kedua, pergeseran studi Islam yang bersifat normative ke historis-sosiologi, dan empiris. Wujudnya adalah perpaduan antara empiric dan sumber wahyu untuk saling mengontrol, dalam arti wahyu mengontrol untuk menghaslkan teroi yang kredibel dan bermanfaat, dan dalam waktu yang sama hasil empiric akan mengontrol proses memahami wahyu. Humanisasi ilmu-ilmu keislaman dan sakralisasi ilmu-ilmu sekuler yang empiris. Ketiga, orientasi keilmuwan baru (non dikotomik), wujudnya kajian bukan hanya studi islam al-ulum al-naqliyah – tanziliyah (bersumber pada wahyu) tetapi sekaligus al ulum al-aqliyah kauniyah ( bersumber alam semesta) yang bersifat empiris (Furchan, 2005; 10-14). Dikotomi ilmu agama-umum dipandang tidak akan dapat melahirkan manusia kompetitif, yang dapat berkiprah diseluruh bidang kehidupan dengan keahlian yang dimilikinya. Secara empiric gerak PTKI sesuai dengan khitah bangsa Indonesia yang plural dari segi agama, ras, etnis, tradisi, budaya. PTKI menjadi factor pemersatu (integrative) bukan pemecah (disintegrative) sebagaimana tekad Bhinneka Tunggal Ika (Furchan, 2005: 15).

* + 1. Kebijakan Akademik Universitas Islam Negeri

1. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik adalah kebebasan sebagai sarjana untuk menggali kebenaran dan menerbitkannya dan membuat hasil-hasil temuan atau pandangan-pandangannya untuk dibahas secara kritis dalam komuniti ilmiah yang relevan untuk ditolak, diperbaiki, atau diakui dan dimantapkan. Kebebsanan dalam memberi pelajaran dan mendidik mahasiswa mengenai bagaimana kebenaran dalam ilmu pengetahuan dapat diperoleh, diketahui, melalui proses-proses yang berlaku menurut metode ilmiah atau logika yang masuk akal (Parsudi Suparlan, 1993: x).

Kegiatan profesi dibutuhkan pedoman moral yang merupakan asas asas moral yang biasanya disebut etika (Soemadi, 1993; 1). Etika dapat digunakan sebagai pedoman moral untuk menciptakan hubungan harmonis sesame profesi dalam kehidupan sosial. Etika dapat dilihat sebagai pencerminan dari tindakan para pelakuknya yag terwujud dalam kualitas moral dan pola pola dari nilai yang dimiliki oleh suatu kelompok profesi. Nilai etik yang terjalin dan terserap di dalam kebebasan akademis mencerminkan adanya hakikat kebebasan akademis (Parsudi, xi). Hakekat etika kademis yang terserap dalam kebebasan ilmiah adalah kejujuran dalam mencari dan menemukan kebearan serta mengungkapkannya. Kejujuran yang penuh dengan daya kritis dan kearifan. Mngungkapkan kebenaran sebagaimana adanya itu baik, tetapi lebih baik lagi bila mengungkapkan kebenaran tersebut secara arif. Permasalahn dalam etika akademik sebenarnya berintikan kejujuran yang hanya terwujud bila didukung oleh kebenaran, kebebasan, dan kearifan dan saling menghargai (Parsudi, xiii). Perguruan tinggi menghidupkan kehidupan akademis, kebebasan akademik, dan etika akademik.

Kebenaran tesis dengan data yang sahih hanya dapat disanggah kebenarannya dengan ditunjukkannya bahwa ada data atau metode yang digunakan data tersebut tidak sahih . kebenaran tesis tidak dapat disanggah oleh kekuasaan politik atau kekuasaan lainnya.

Andi hakim Nasution menolak menghentikan hasil temuan ilmuan mengenai kutu lompat. Berkata benar itu baik, berkata arif itu lebih baik lagi. Alasannya “Sebagai sesame ilmuan saya tidak punya kuasa dan menolak untuk menghentikan temuan dan pendapat ilmuan tersebut karena ia paling kompeten dan terutama temuannya didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Suparlan, 1993: xiv-xv).

Orang kampus harus jujur, tanpa ini sesuai patokan akademik. Tanpa itu universitas tidak dapat menegakkan etika akademiknya, tanpa penegakan akadmik maka etika ilmu pengetahuan tidak dapat ditegakkan, tanpa ini semua profesionalisme tidak dapat ditegakkan (xviii). Universitas melakukan penemuan-penemuan baru melalui penelitian ilmiah yang dilakukan dosen, sarjana yang diluluskan sebagai hasil dari mutu pembelajaran yang diadakan (Suparlan, 1993: xviii).

Tugas khas universitas adalah menemukan dan mengajarkan kebenaran tentang hal yang serius dan penting, seperti meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan melatih sikap, metode untuk mengkaji dan menguji secara kritis kepercayaan-kepercayaan mereka sehingga apa yang mereka percayai sedapat mungkin terbebas dari kekeliruan (Shils, 1993: 1). Memastikan kebenaran sukar. Kebenaran harus terus diuji kembali. Kebenaran berubah karena penemuan-penemuan baru. Maka kebenaran ada kesementaraan dan kesediaan untuk meninjau kembali terhadap keenaran yang ada saat ini. Univ memeberikan pendidikan tentang proses fundamental, prinsip dasar dan metode analisis yang asasi. Universitas sumber perubahan berlandaskan intelektual, akademis (Shils, 1993: 6).

Dosen mencurahkan penelitian yang berbeda-beda. Jika mengutamakan pengajaran maka dosen harus melakukan penelitian yang mendasar dan penting untuk tujuan pengajaran (Shils, 1993: 9). Universitas mencari, menemukan , dan mengetengahkan pengetahuan yang dipercaya (Shils, 1993: 17). Etos etika akademik ada sejak sebelum ada universitas berdiri. Etika akademik dianggap jelas karena itu tidak dianggap mendesak untuk disebarluaskan (Shils, 1993:18-19).

Etika akademik hanya berkaitan dengan usaha menggali dan menyebarkan pengetahuan ilmiah dan humaniora di dalam universitas dan antar universitas serta bertalian dengan kegiatan yang membawa-bawa pengetahuan itu ke luar universitas (Shils, 1993: 178-179). Kewajiban fundamental akademis mengajar, meneliti dan memelihara komunitas akademis, berlaku pada semua akademikus (Shils, 1993: 193). Kebebasan Akademik, Etika Akademik, dan Otonomi Keilmuan (universitas bukan menara gading, bukan menara air, tetapi menara api yang memancarkan sinarnya ke berbagai penjuru, menerangi masyarakat seluruhnya (Notosusanto, 1983: 9).

* + 1. Integrasi keilmuan

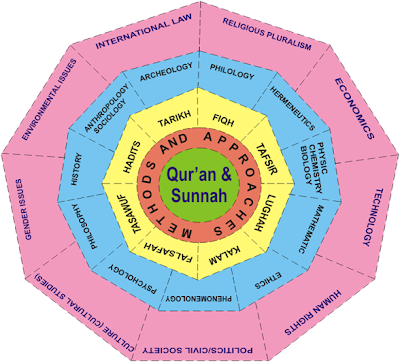
Sejarah hubungan sains dan agama mengalami dinamika yang dinamis, mulai dari era konflik (conflict), keterpisahan atau kemandirian (independence), percakapan atau dialog (dialogue), dan integrasi atau pemaduan (integration) (Barbour, 2000; Baqir, 2004). Dalam bahasa yang sedikit berbeda, ada yang mengelompokkan menjadi empat pendekatan relasi sains dan agama yaitu: konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi (Haugh, 2004).

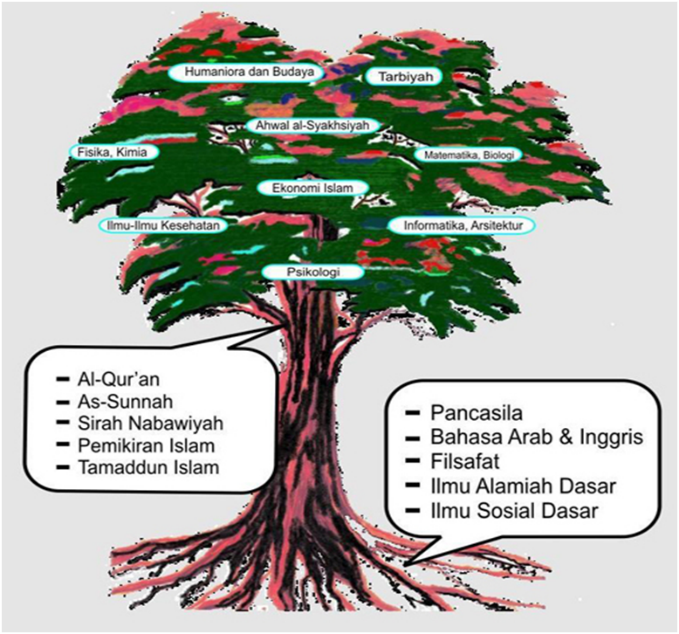
Untuk mencapai pada relasi agama dan sains yang lebih konstruktif dibutuhkan metodologi keilmuan yang bersifat historis, terbuka, mendasar, open ended supaya tidak kehilangan elan vital etos Qur’aniy (Esack; 1997). Cara pandang ini yang menyebabkan dalam studi keislaman mengalamai pergeseran; pertama, filologis-orientalistik; kedua, fungsionalis-modernis; dan ketiga hermeneutik-interpretative (Lincoln, Cuba; 1985).

Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN/S) di Indonesia telah terjadi *shifting paradigm.* Pergeseran dari ideologis (ideology-tertutup, kecenderungan jawaban tunggal, berpihak pada kepentingan tertentu, menepikan kepentingan orang lain) ke dari keilmuan (scientific-terbuka) dengan pendekatan multi dan interdisiplin. Dari studi keislaman dikotomis-atomistik: bayani, irfani, burhani (al-Jabiri: 1989), normativitas-dogmatis ke historisitas-integrasi-interkoneksi (Abdullah; 1997, 2006, 2012).

Integrasi-interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora), sehingga PTKI selalu dapat menjawab tantangan zaman yang membutuhkan kemampuan kerja (work), komunikasi (communication), dan transformation; liberation (etika) (Habermas; 1971). Di UIN Sunan Kalijaga menggunakan paradigma Jaring Laba-laba keilmuan Teoantroposentrik-integralistik (Abdullah, 2006; 107); di UIN Maliki Malang dengan paradigma Pohon Ilmu Integrasi Keilmuan UIN Malang (Suprayogo; 2006); dan di UIN Syarif Hidayatullah dengan paradigma reintegrasi (Azra; 2001); dan konsep lain yang juga telah dirumuskan oleh beberapa UIN dan IAIN, terutama yang sedang menuju perubahan menjadi UIN.

Setidaknya enam prinsip dasar dalam membangun konsep maupun implementasi integrasi ilmu PTKI, yaitu intelektualisme, inteligensia, keterbukaan, kekinian, keindonesian, dan kesalehan (Diktis; 2019). Intelektualisme adalah sikap mental dan kapasitas penguasaan dan penghormatan atas reason, fakta dan logika yang membentuk penguasaan metodologi dan konstruksi ilmu yang memadai. Intelegensia adalah sikap mental terdidik yang memiliki perhatian pada nasib masyarakat dan lingkungan. Keterbukaan adalah sikap mental yang siap menerima perubahan dan sikap toleran terhadap sesama. Kekinian mengacu kepada perhatian akan pentingnya relevansi perguruan tinggi dengan tuntutan zaman, keindonesiaan adalah nasionalisme yang diekspresikan melalui rasa cinta tanah air, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ikut bertanggung jawab akan kemajuan bangsa. Terakhir, kesalehan adalah sikap mental menjaga nurani, ketaatan kepada ajaran agama, dan orientasi berbuat baik dalam kehidupan.

Jaring Laba-laba keilmuan Teoantroposentrik-integralistik dalam Universitas Islam Negeri (Abdullah, 2006; 107)

1. 

Pohon Ilmu Integrasi Keilmuan UIN Malang (Suprayogo; 2006)

* + 1. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Para ahli kurikulum memiliki keragaman dalam memberikan definisi kurikulum. Ada yang memberikan pengertian secara abstrar, konseptual, luas, sempit, teknis, dan perpaduan konseptual dan teknis. Kurikulum adalah semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik dibawah bimbingan guru, *all the experiences children have under the guide of teacher* (Oliva, 1982: 6). William B Ragan dan Carter V Good mendefinisikan kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru/sekolah kepada peserta didik guna mendapatkan ijazah atau sertifikat (Sukiman, 2015: 2). Kurikulum adalah program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Surahmad, 1977: 5). Kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada peserta didik dibawah tanggungjawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi peserta didik (Nana Sudjana, 1996: 5). Kurikulum memiliki tiga domain; kurikulum sebagai program, yaitu alat-alat yang dipakai sekolah untuk mencapai tujuan, baik dalam bentuk pelajaran maupun kegiatan lain yang lainnya. Kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa; pengetahuan, sikap, ketrampilan. Apa yang diharapkan dipelajari tidak selalu sama dengan yang dipelajari. Kurikulum sebagai pengalaman siswa, yaitu apa yang menjadi kenyataan actual bagi siswa (Nasution, 2003: 9). Dalam UU No 20 tahun 2003, kurikulum dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pemebalajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai devinisi di atas tersirat dalam kurikulum adalah program dan rencana (kurikulum potensial) yang berwujud buku kurikulum tentang garis program pembelajaran yang meliputi tujuan, isi/materi, rencana KBM, dan penilaian. Pengalaman belajar atau kegiatan nyata (kurikulum actual), yaitu wujud nyata saat proses pembelajaran atau wujud kongrit implementasi kurikulum potensial (Sukiman, 2015: 3-4).

1. Kurikulum PTKI
2. Basis Kurikulum PTKI

Pengembangan kurikulum di PTKI bertolak dari beberapa pandangan dasar berikut; Pertama, PTKI mengemban misi pengembangan keilmuan atau kajian ilmu-ilmu keislaman yang bersifat rasional, dinamis, analitis kritis, empiri, antisipatif, sekaligus lembaga keagamaan yang berusaha membangun sikap dan perilaku beragama yang loyal, memiliki komitmen (pemihakan) kepada islam, penuh dedikasi pada agama yang diyakini kebenarannya, atas dasar wawasan keilmuan keislaman dengan tetap menjaga kerukunan hidup beragama yang dinamis. Kedua, PTKI sebagai penyelenggara program pendidikan akademik, vokasional dan atau professional mengemban misi menyiapkan lulusan yang mampu mengintegrasikan kepribadian ulama dengan intelektualitas akademik dan atau vokasional/professional sesuai program studi yang ditekuni. Ketiga, PTKI bagian integral pendidikan nasional. Keempat, sebagai lembaga dakwah (Furchan, 2005: 15-17).

Pandangan di atas berorientasi pada pengembangan kurikulum PTKI yang menekankan pada meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan landasan keilmuan yang kokoh. Kedua, upaya pemberian basic competencies ilmu-ilmu keislaman sebagai ciri khas PTKI sekaligus sebagai landasan dan pendasaran dalam pengembangan bidang studi yang ada. Ketiga, upaya penyaluran bakat, minat dan kemampuan akademik/vokasional/professional dalam pengembangan bidang studi yang bermanfaat bagi users, pembangunan masyarakat dan studi lanjut. Keempat, upaya pencegahan timbulnya pengaruh negative dari perkembangan iptek dan globalisasi. Kelima, pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif-komparatif dalam kehidupan berbagangsa dan bernegara ditengah kehidupan global. Keenam, upaya mewujudkan kehidupan sepanjang hayat (Furchan, 2005, 16-17).

Substansi pendidikan adalah refleksi atas problem actual yang dihadapi masyaraktat (Furchan, 2005: 28; Shahidi, 2012). Maka dalam menyusun kurikulum berangkat dari problem dan diproses dalam pembelajaran berupaya memecahkan problem yang dihadapi. Karena itu kurikulum yang ideal di pendidikan tinggi adalah menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan isi pendidikan terus berkembang.

Pembenahan kurikulum PTKI pada tahun 2004 melalui KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang telah dimulai sejak tahun 2002/2003. Fungsi kurikulum ini dapat diarahkan kepada para pimpinan perguruang tinggi, pendidik, pejabat kemenag, dan penerima lulusan. Bagi pimpinan perguruan tinggi kurikulum berfungsi sebagai pedoman kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Bagi dosen sebagai pedoman KBM. Bagi kemenag kurikulum sebagai tolak ukur peentuan kebijakan Bagi penerima lulusan, kurikulum sebagai tolok ukur penentuan kadar lulusan (Furchan, 2005, 30-31).

Kurikulum PTKI akan lebih baik jika dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan masing-masing PTKI sesui kondisi masyarakat, perkembangan iptek, penyediaan sarana prasarana yang memadai, yang bertumpu pada pembentukan religiusitas dan spiritualitas mahasiswa (Furchan, 2005, 31). Karena itu Kemenag telah menentukan kebijakan pengembangan kurikulum PTKI sebagai berikut; Pertama, kurikulum berbasis hasil belajar. Kedua, kurikulum terdiri atas kurikulum inti (40 persen ditentukan oleh pusat) dan kurikulum institusional (60 persen dibuat oleh PTKI masing-masing) yang ditetapkan oleh pusat, dan kualitas kurikulum menjadi tanggungjawab PTKI masing-masing (Furchan, 2005, 33).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa kurikulum perlu dikembangkan dengan emnitikberatkan pada konetensi dari pada penguasaan materi. Mengakomodadi keragaman kebutuhan dan sumberdaya pendidikan yang tersedia. Memberikan kebebasan lebih luas pada PTKI untuk mengembangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum memuat kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian pada semua program studi (Furchan, 2005, 34).

Kurikulum ideal PTKI memperhatikan kepentingan dan kehasan sesuai kondis masyarakat, perkemangan iptek, tuntutan zaman, tahapan pembangunan, penyediaan sarpras yang memadai yang bertumpu pada pembentukan sikap religiusitas dan spiritualitas peserta didik. Dibutuhkan fleksibelitas kurikulum. Bisa bongkar pasang pada batas tertentu setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum memenuhi standar efektifitas, efisiensi, dan menarik (Furchan, 31).

Ada beberapa kelemahan mendasar kurikulum PTKI, yaitu; 1. Kurang relevan dengan kebutuahn masyarakat; banyak prodi yang tidak diminati dipertahankan. Kurang efektif, tidak menjamin dihasilkan lulusan sesuai harapan. 3. Kurang efisien, banyak mata kuliah dan sks tidak menjamin hasil yang bagus. 4. Kurang fleksibel, kurang berani secara kreatif dan bertanggungjawab mengubah kurikulum untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal-global. 5. Readability rendah, tidak komunikatif multi tafsir. 6. Hanya deretan mata kuliah. 7. Berfokus pada mata kuliah, penyampaian materi bukan pada tujuan kurikuler/hasil belajar/mutu lulusan. Hubungan fungsional antar mata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas (Furchan, 33).

Untuk mengatasi Dirpertais mengambil kebijakan 1. Kurikulum berbasis hasil belajar. 2. Kurikulum terdiri Inti dan institusional. 3. Kurikulum inti 40% ditetapkan pemerintah dan berlaku nasional, 60% ditetapkan institusional berlaku lokal. 4. Kurikulum semua ditetapkan PTAI. 5. Kualitas kurikulum menjadi tangungjawab PTKI.

1. Kurikulum PTKI Berbasis KBK

Kurikulum KBK ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas 232/u/2000 tentang pedoman penyususnan kurikulum dan hasil belajar mahasiswa. Kepmendiknas 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.

KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai mahasiswa, penilaian, KBM, dan pemberdayaan sumberdaya pendidikan dalam pengembangan kurikulum kelembagaan. Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggungjawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan.

KBK memiliki 4 komponen. Pertama, kurikulum dan hasil belajar. KHB bagi dosen untuk mengambil keputusan tentang substansi silabus, kompetensi pembelajaran, hasil beajar yang harus dicapai, dan standart untuk menilai hasil belajar bahasiswa. Dua, Kompetensi dasar. Pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah mahasiswa selesai aspek/pelajaran tertentu. Tiga, Hasil belajar. Merefleksikan keluasan, kedalaman, kompleksitas dan digambarkan secara jelas, terukur dengan teknik-teknik tertentu. Empat, Indikator hasil belajar. Sebagai dasar penilaian bagi mahasiswa (Furchan, 2005: 40).

Kedua KBM. Pemberian muatan pedagogis-andragogis untuk mencapa standar kompetensi sesuai dengan perkembangan dan kemampuan mahasiswa. KBM harus menunmbuhkan berbagai kecerdasan, moral spiritual, intelektual, emosional, kreatif, dan ketahanmalangan (SQ, IQ, CQ, EQ, dan AQ). Untuk semabnagn dalam KBM maka dapat dialakukan berbagai startegi dan pendekatan seperti CTL (conteqtual teaching learning), QTL (Quantum teaching learning), dan AL (active learning). Prinsip utama pembelajaran adalah konstruktifism, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik (Furchan, 2005: 41).

Ketiga, Penilaian Berbasis Kelas. Suatu proses pengumpulan, pelaporan,dan penggunaan informasi tentang hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti autentik, akurat dan konsisten. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar mahasiswa dan pelaporan. Penilaian dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran. PBK dilakukan dengan pengumpulan kerja mahasiswa (portofolio-kolokium), hasil kerja (product), penugasan (proyek) kinerja (performance), tindakan (action) dan tes tertulis (subyektif, obyektif, dan proyektif) (Furchan, 2005: 441-42).

Keempat, pengelolaan kurikulum Berbasis PTKI. Suatu pola pemberdayaan tenagah kependidikan dan sumber daya pendidkan dan berbagi peran untuk meningkatkan hasil belajar. Misalnya diktis menyusun landasan filosofis, konseptual, dan operasional KBK, menyusun kompetensi dasar, hasil belajar, indicator hasil belajar, menyusun KBM dan penilaian berbasis kelas. PTKI bertugas mengembangkan silabus, seleksi materi, implementasi kurikulum, dan pemantauan dan evaluasi kurikulum (Furchan, 2005: 43).

KBK menekankan pada hasil. Outcames merupakan kompetensi yang dapat diukur. Evaluasi keberhasilan merupakan ukuran penguasaan kompetensi yang telah dicapai oleh mahasiswa. Relevansi lebih besar pada pekerjaan dan tugas-tugas nyata duniakerja. Menekankan pada kemampuan berfikir tingkat tinggi.

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa KBK di PTKI lebih menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi dari pada penguasaan materi. Lebih mengakomodasi keragaman kebutuhan dan sumberdaya pendidikan yang tersedia. Memberikan kebebasan lebih luas kepada pelaksana di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran (Furchan, 2005: 44).

1. Kurikulum PTKI Berbasis KKNI

Konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Perpres No 8 tahun 2012 dan UU No. 12 tahun 2012 adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.

Kualifikasi pendidikan tinggi dalam permendikbud no 73 2013 adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non formal, informal, dan atau pngalaman kerja dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Kurikulum KKNI prinsipnya sama dengan KBK, hanya KKNI adalah pengembangan dari KBK. Aspek KKNI dalam bidang pendidikan tinggi yang harus diselesaikan antara lain, redesain kurikulum, implementasi kurikulum, penjaminan mutu internal, dan surat keterangan pendamping ijazah (Sutrisno, Suryadi, 2015: 6).

* + - 1. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian tentang kebijakan perguruan tinggi telah dilakukan para peneliti sebelumnya, namun untuk kajian PTKI yang dilakukan secara utuh, masih sangat terbatas. Dalam review literatur ini saya mengelompokkan dalam tiga kategori; Pertama kategori kajian tentang perguruan tinggi secara umum. Kedua, kategori kajian tentang kebijakan Pendidikan Islam secara umum. Ketiga, kajian tentang PTKI.

Pertama, kategori kajian tentang perguruan tinggi. Semua hasil penelitian di bawah ini memberikan fokus pada kajian perguruan tinggi, tetapi tidak mengkaji atau jika ada hanya sekilas saja tentang perguruan tinggi Islam. Semua hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan wawasan perkembangan dan perubahan tentang kebijakan penguruan tinggi pada umumnya di Indonesia sejak 1998-2018.

Mayling Oey-Gardiner, M. Amin Abdullah, dkk, *Era Disrupsi Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia,* Mayling Oey-Gardiner, M. Amin Abdullah, dkk, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jakarta, 2017. Buku ini mengkaji pentingnya perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan diri supaya dapat bersaing dengan perguruan tinggi di dunia, dengan cara mengembangkan disiplin keilmuan, riset, metode pembelajaran, pengelolaan SDM, dan keuangan. Ada uraian sedikit tentang konsep integrasa-interkoneksi keilmuan yang kita ketahui konsep itu dirintis dan dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga.

Galih R. N. Putra, *Politik Pendidikan Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India,* Yayasan Buku Obor, Jakarta, 2016. Penelitian ini secara khusus menguraikan tentang liberalisasi Pendidikan tinggi di Indonesia dan India, dengan kesimpulan; Pertama, telah terjadi liberalisasi di perguruan tinggi di Indonesia yang ditandai dengan desentralisasi pada PTN dengan memberikan otonomi dalam manajemen dan keuangan. Subdisi pada PTN dikurangi, sehingga mahasiswa harus membayar lebih mahal. Kontrol langsung PTN oleh Lembaga yang dibuat oleh perguruan tinggi masing-masing. Melakukan kerjasama dengan dunia industry untuk menambah pemasukan. Menggunakan tenaga outsourcing lebih banyak. Munculnya PTN bertujuan profit dan terakhir masyarakat miskin sulit mengakses Pendidikan tinggi.

Darmaningtyas, dkk., *Melawan Liberalisme Pendidikan,* Madani, Malang, 2014. Penelitian ini mengkaji tentang UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Kesimpulannya bahwa UU ini merupakan bentuk nyata dari liberalisasi dan privatisasi Pendidikan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada akhirnya melalui Yudisial Riview di Mahkamah Konstitusi maka UU ini dibatalkan pada tanggal 31 Maret 2010.

Kedua, kategori kajian tentang Kebijakan Pendidikan (Islam). Ketiga hasil penelitian berikut ini secara umum memberikan bingkai yang sangat penting, bagaimana kebijakan Pendidikan (Islam) sangat dinamis, bukan hanya dalam dua puluh tahun terakhir, tetapi sejak zaman penjajahan. Namun penelitian yang telah dihasilkan di bawah ini tidak memfokuskan pada penguruan tinggi, tetapi lebih pada aspek peran tokoh Islam dalam proses kebijakan Pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003), pendidikan dasar-menengah, dan konsep PAI dari pendidikan dasar-menengah, serta isu mutakhir yang penting dalam PAI di perguruan tinggi.

Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Islam yang dichotomis merupakan warisan dari sejarah masa lalu yang masih terus terjadi sampai saat ini. Kedua kebijakan Pendidikan Islam memiliki beberapa tipologi yaitu adaptif, akomodatif, diskriminatif, integrative, dan reformatif. Namun yang menjadi subyek penelitian ini tidak pada PTKI.

Abd. Rachman Assegaf, *Politik Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi,* Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia sejak zaman penjajahan selalu terkait dengan konteks politik pada zamannya. Perubahan muatan PAI di Indonesia sejak tahun 1950, 1968, 1975, 1984, 1994 himgga 2004 merupakan cermin perubahan dan keragaman. Penelitian ini juga merekomendasikan pentingnya PAI berwawasan kebangsaan, demokrasi, pluralism, dan HAM.

Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989,* INIS Leiden-Jakarta, 2004. Penelitian ini secara khusus membahas tentang peran-peran para tokoh Islam dalam memperjuangkan kepentingannya supaya masuk dalam UU No. 2 Tahun 1989. Gerakan yang dilakukan misalnya melalui menulis surat, pertemuan-pertemuan, hearing dengan DPR dan pemerintah, serta melakukan demonstrasi.

Ketiga, kategori kajian tentang Perguruang Tinggi Keagamaan Islam. Berikut adalah tiga kajian penting yang terkait langsung dengan PTKI.

*Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran.* Nurlena Rifai, Fauzan dan Bahrissalim. Tarbiya: Journal of Education and Muslim Society Vol. I No. I. Juni 2014. Ini penelitian mutakhir tentang konsep integrasi keilmuan yang diimplementasikan di enam UIN, Jambi, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan Makasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga grade. Grade satu, UIN Malang dan Yogyakarta karena telah memiliki konsep integrase, mulai dari paradigma, yang diimplementasikan dalam kurikulum dan dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Gread kedua UIN Jakarta dan Bandung. Kedua UIN ini telah memiliki konsep integrase tapi masih dalam bentuk bunga rampai, tetapi belum terformulasikan, dan belum ada rumusan yang bisa dijadikan pegangan civitas akademika. Grade ketiga UIN Jambi dan Makasar yang masih dalam tahap mempelajari. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan peta konsep integrase di enam UIN di Indonesia tersebut.

*Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Riset ini memberikan peta penting tentang perkembangan keilmuan di IAIN/UIN/STAIN di Indonesia. Tesis utamanya bahwa periode 1990-1997 ketegangan keilmuwan di PTKI ada pada sisi normativitas dan historisitas. Tetapi sejak reformasi (1998) untuk mengurangi ketegangan kajian Islam dikenalkan dengan paradigma intekoneksitas (integrative-interkonektif). Kontribusi penting penelitian ini adalah memberikan integrasi ilmu secara paradigmatic, yang diimplementasikan utamanya di UIN Yogyakarta.

Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam,* Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000. Buku ini adalah bunga rampai tentang dinamika, capaian, tantangan, peluang IAIN dari segi Visi IAIN, Wacana Keilmuan IAIN, dan peran alumni IAIN di masa depan, yang ditulis para pakar dan guru besar beberapa IAIN di Indonesia pada tahun 2000. Kontribusi penting buku ini adalah memberikan kerangka bagaimana para pakar dan guru besar IAIN memiliki kegelisahan bagaimana mengemabangkan IAIN menjadi institusi yang membanggakan dan diterima masyarakat dengan baik. Dari buku ini tampaknya yang memicu terjadinya transformsi secara besar-besaran di PTKI sampai saat ini.

Semua penelitian di atas belum ada yang membahas secara komprehensif tentang PTKI dalam konteks penelitian analisisi kebijakan. Karena itu penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan.

* + - 1. Kerangka pikir

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan analisis kebijakan untuk menghasilkan sebuah usulan atau alternatif-alternatif rekomendasi tentang model pengembangan akademik di 3 UIN di Indonesia. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; 1. Identifikasi permasalahan social politik; Model Budaya Akademik Sekarang; Merumuskan Model pengembangan Akademik (FGD I); Mengembangkan model pengembangan Akademik (FGD 2); Pemilihan alternatif-alternatif kebijakan; dan Membuat rekomendasi.

Jika digambarkan, kerangka pikir tersebut sebagai berikut;

**Kerangka Pikir Penelitian**

Identifikasi masalah konseptual dan teknikal integrasi keilmuan dalam kurikulum

Model integrasi keilmuan dalam kurikulum saat ini

Merumuskan model kebijakan integrasi keilmuan dalam kurikulum

Mengembangkan alternatif-alternatif model integrasi keilmuan dalam kurikulum dalam kurikulum

Pemilihan alternatif model integrasi keilmuan dalam kurikulum

Membuat rekomendasi model integrasi keilmuan dalam kurikulum

Presentasi rekomendasi model integrasi keilmuan dalam kurikulum

Masukan dari pengguna kebijakan

BAB III

METODE PENELITIAN

* + - 1. Jenis Penelitian

Penelitian analisis kebijakan ini termasuk penelitian kualitatif non interaktif. Analisis kebijakan dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan kebijakan tersebut.

* + - 1. Metode

Penelitian ini menggunakan dua tahap;

1. Metode kualitatif inquiri (deskriptif kualitatif) untuk mencari masalah yang terkait dengan masalah kebijakan akademik dan memotret proses pelaksanaaan budaya akademik di 3 UIN.
2. Hasil tahap satu digunakan untuk melakukan tahap kedua untuk menyusun agenda kebijakan (merumuskan maslah kebijakan dan formulasi kebijakan (peramalan kebijakan). Tahap kedua dengan pendekatan *social action* dalam studi kebijakan dengan model Focul Grup Discussion (FGD).
3. FGD dilakukan dalam 2 tahap: FGD tahap I untuk menyusun agenda kebijakan (merumuskan masalah kebijakan). FGD II untuk membuat formulasi kebijakan (peramalan kebijakan) dan pemilihan alternatif kebijakan. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;
4. Metode penelitian Tahap I (Kualitatif Deskriptif)
5. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik (deskriptif kualitatif). Pendekatan ini tepat digunakan karena lebih mendalam, lengkap, holistic, komprehensif memotret secara mikro dan makro.

Penelitian ini menggunakan qualitatif diskriptif supaya lebih terarah dan terfokus. Selalu melakukan proses berfikir reflektif sehingga akan mampu menemukan makna dibalik fakta (Denzin & Lincoln, 1994; 199).

Penelitian studi kasus., dengan alas an kebanyakan studi kasus dalam penelitian kebijakan bersifat kualitatif. Metode studi kasus seringkali digunakan dalam penelitian kebijakan kare cepat, efisien (denim, 2005; 189-190). Ketiga studi kasus dapat mengkaji unit social tertentu secara mendalam, lengkap, tentang sikon, sehingga dapat memberikan gambaran yang tajam, luas, jelas. Studi kasus dapat digunakan untuk unit social seperti individu, kelompok, lembaga, komunitas, maupun peristiwa tertentu (Djuju Sudjana; 2006, 106-107).

1. Tempat dan Waktu
2. Tempat penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian di UIN Sunan Kalijaga, UIN Malang, dan UIN Jakarta di dasarkan atas pertimbangan; Pertama, ketiganya adalah PTKIN yang berubah paling awal dari STAIN/IAIN menjadi Universitas. Kedua, Memiliki reputasi terbaik di Indonesia.

1. Waktu Penelitian. P

Penelitian akan dimulai dari bulan 1 Oktober 2021 – 30 April 2022.

1. Subyek dan obyek penelitian
2. Subjek penelitian.

Subyek penelitian ini adalah civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, UIN malang, dan UIN Jakarta, seperti rector, wakil rector, dekan, wadek, kaprodi, dosen, dan tim LPPMA, berjumlah 30 orang. Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara purposive dan berkembang mengikuti bola salju (snowball), dengan memulai dari pengumpulan data dan informasi yang sederhana (sedikit), berkembang sampai data dan informasi dianggap sudah jenuh.

1. Obyek penelitian

Obyek primer penelitian tahap I adalah permasalahan kebijakan dan proses akademik yang berlangsung di tiga UIN. Obyek sekunder penelitian tahap I adalah deskripsi institusi tiga UIN.

1. Teknik dan instrumen pengumpulan data

Setting penelitian dalam *naturalistic ecological theory* disebutkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh latar belakang perilakunya sendiri (Zamroni, 1992: 80). Untuk mengetahui hakekat perilaku, maka setting penelitian harus alami. Artinya peneliti tidak melakukan intervensi baik dalam pengamatan maupun wawancara. Dengan demikian data diambil dalam situasi yang wajar, apa adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Penelitian ini dengan menggunakan tiga setting penelitian, setting pimpinan universitas, setting penjamin mutu akademik, dan setting pembelajaran.

Setting pimpinan universitas dilakukan dengan mendeskripsikan peran pimpinan universitas bagaimana merumuskan dan menyampaikan konsep kebebasan akademik, integrasi keilmuwan dan integrasi dalam praktik pembelajaran.

Setting penjamin mutu akademik dilakukan dengan mendiskripsikan pelaksanaan dalam penjaminan kebebasan akademik, integrasi keilmuwan, dan praktik pembelajaran.

Pada setting pembelajaran dilakukan dengan mendiskripsikan bagaimana kebebasan akademik, integrasi keilmuwan di praktikkan dalam pembelajaran pada mahasiswa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara; observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk mendapatkan tentang sejarah dll. Peneliti membaur dengan kehidupan orang-orang dan situasi yang ingn diselidiki (Bogdan dan taylor, 1992; 23). Dengan cara membaur maka peneliti dimungkinkan untuk mendapatkan proses pelaksanaan akademik di tiga UIN.

Peneliti juga mencari makna di belakang kelakuan (ucapan, perbuatan) sehingga dapat memahami masalah dan situasi yang sedang diteliti. Metode ini untuk memahami kelakuan manusia dalam konteks luas dari kerangka dan pemikiran perasaan responden (emik). Peneliti menggunakan data langsung dengan cara observasi, wawancara dan mencari dokumen dilakukan sendiri.

Prosedur pengumpulan data dimulai dari studi pendahuluan, pengamatan-observasi, wawancara dengan responden kunci, dan mencari data dokumen yang relevan. Kemudian dilakukan pembuatan pradesain, seminar predesain, ke lapangan, pengumpulan data, analisis data, membuat laporan, menemukan pertanyaan baru, kembali ke lapangan dan seterusnya hingga data jenuh. Polanya kerja spiral.

1. Instrumen pengumpulan data.

Instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah peneliti. Posisi peneliti dalam pengumpulan data adalah instrument kunci. Dalam pengambilan data suara, gambar, peneliti menggunakan alat bantu kamera dan recorder.

1. Keabsahan Data.

Teknik pencapaian keabsahan data peneliti menggunakan dua cara. Pertama, makna dalam konteks. Data dipahami dalam konteks holistic yang mengacu pada makna yang terdapat dalam konteks sejenis. Misalnya, ketika memaknai kebebasan akademik, ada yang mengatakan: kebebasan kami melakukan pembelajaran dari hasil riset. Ada yang mengatakan “Kami mengajarkan cara-cara penemuan secara ilmiah”. Maka keduanya emmiliki makna yang sama dalam konteks kebebasan akademik.

Kedua, Trianggulasi. Data dari subyek penelitian diverifikasi dengan subyek yang lain sampai jenuh. Misalnya, ada pimpinan yang mengatakan bahwa integrasi keilmuwan telah dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka akan dicek kepada dosen, apakah sudah ada panduan tertulis tentang materi perkualiahan yang menggunakan konsep integrasi keilmuwan? Kepada mahasiswa ditanyakan “materi apa yang termasuk dalam aspek integrasi keilmuwan. Jika ketiganya cocok maka data kredibel.

1. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dengan menggolongkan dalam pola, tema-kategori, untuk menghindari chaos. Kemduian dilakukan penafsiran, interpretasi guna memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola, kategori dan mencari hubungan berbagai konsep. Interpretasi ang dilakukan menggambarkan perspektif orang dalam (emik) bukan perspektif peneliti.

Data yang diperoleh setiap hari langsung dilakukan naalisis pada hari yang sama. Supaya tidak lupa dalam meganalisis. Bila terjadi pengembangan ide atau tema baru bisa dilakukan pada saat hari berikutnya. Jika ada data yang kurang bisa langsung dilakukan penambahan atau verifikasi kepada informan.

Alasan analisis dilakukan pada saat melakukan penelitian, supaya diketahui segera data yang kurang. Hipotesis apa yang harus di tes. Pertanyaan apa yang harus dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mencari informasi baru. Kesalahan apa yang harus diperbaiki. Membuat laporan berkala dan kait mengait.Setiap data deskripsi membutuhkan penafsiran. Namun selalu dibedakan antara data deskriptif dan data analsiis tafsiran.

1. Metode Penelitian Tahap II (FGD)

Penelitian menggunakan pendekatan partisipatif, bersifak social action dalam policy studi. Cara yang dilakukan melalui FGD. FGD ada dua tahap. Tahap I bertujuan untuk merumuskan masalah kebijakan (policy problem) atau menyusun agenda kebijakan. FGD II bertujuan mengembangkan alternative kebijakan atau formulasi kebijakan, yaitu model pengembangan akademik di tiga UIN.

Dalam proses alternative kebijakan sebelum diusulkan menjadi sebuah rekomendasi, peneliti melakukan diskusi dengan pihak pengguna (user) untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan pengguna secara politis terhadap kebijakan yang diusulkan. Juga menjajaki peluang setiap alternative kebijakan yang ditawarkan untuk mengimplementasikan.

Alasan digunakannya FGD II adalah sebagai berikut; Pertama, dalam paradigma kebijakan sosial dan pendekatan sosial action sebuah kebijakan yang baik bersifat *battom up* (bawah-atas) sehingga ketika akan diimplementasikan membumi sesuai dengan kondisi di level paling bawah. Kedua, kebijakan harus baik dalam pelaksanaan, dapat diterima dan dapat dilaksanakan. Ketiga, penelitian kebijakan bersifat aksi sehingga perlu menumbuhkan perasaan memiliki oleh pengguna, maka perlu dilibatkan secara langsung dalam merumuskan, membuat, memilih alternative kebijakan. Keempat, data, informasi mengenai kebutuhan tidak bisa dilakukan dengan wawancara dan survey. Secara metodologis tepat dengan FGD karena peserta lebih terbuka dan natural disbanding metode lainnya (Tohardi, 2010; 133-134).

FGD dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relative singkat, sebagai metode yang dirasakan sangat cocok bagi permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik, maka FGD cara yang sesuai (Irwanto, 2006; 5).

1. Pengertian FGD

FGD adalah diskusi kelompok terfokus. Dilakukan secara terarah, terfokus atas isu atau masalah tertentu. FGD salah satu metode pengumpulan data melalui diskusi bersama dengan menggunakan teman atau isu tertentu (Isa Wahyudi, 2006: 63). Dapat memebrikan perspektif yang berbeda disbanding dengan pengetahuan melalui komunikasi searah antara peneliti dengan yang diteliti (Irwanti, 2006; 4).

1. Kelemahan FGD.

Meskipun FGD memiliki banyak kelebihan, namun secara spesifik FGH memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa digunakan untuk generalisasi, krn FGD tidak untuk generalisasi suara masyarakat. FGD yang diutamakan adalah kedalaman menghasilkan sebuah data dan informasi yang diperlukan peneliti.

1. Etika FGD

Ada beberapa etika yang harud dialakukan dalam melaksanakan FGD, diantaranya sebagai berikut; 1. Tujuan dan perkenalan peserta. 2. Memberikan kesempatan pembicara menyelesaikan bicaranya. 3. Menyiapkan panduan fgd. 3. Menggunakan waktu efektif dan efisien. 6. Mendokumentasikan proses pelaksanaan 6. Menyampaikan ucapan terima kasih pada peserta (Isa Wahyudi, 2006; 67).

1. Model FGD.

Ada dua model FGD, yaitu Parsial dan konfrontatif (Isa Wahyudi, 2006; 64). Parsial adalah pemikiran peserta memiliki kesamaan pandangan. Konfrontatif, yang secara ide bertentangan hadir dalam satu forum.

FGD dalam penelitian ini termasuk kategori parsial karena untuk mencari kesamaan pandangan dari individu dan kelompok di tiga UIN. Juga untuk menemukan kesamaan sikap, komitmen dalam menentukan langkah kongrit dalam melaksankan kebijakan.

1. Jumlah dan Kriteria Peserta FGD.

Secara teoritik dalam FGD tidak ada panduan jumlah jumlah pesertanya. Tergantung cakupan masalah, dan dan spektrum pengalaman peserta. Semakin luas spectrum peserta, maka jumlah peserta semakin sedikit. Kesempatan berbicara lebih banyak dan yang dibicarakan berbobot dan efektif. FGD dalam penelitian ini mengikuti Dowson dan Tallo, bahwa jumlah peserta FGD 7-11 orang (Dowson dan Tallo, 1993: 27).

1. Analisis kebijakan pada FGD I
   * 1. Tujuan FGD I.

Tujuan FGD II adalah untuk menyusun agenda kebijakan atau merumuskan masalah kebijakan. Peneliti juga membangun persepsi masalah akademik di UIN jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi masalah dikemudian hari.

Peneliti menyampaikan tentang tiga bidang akademik kebebsaan akademik, integrasi keilmuan dan kurikulum UIN. Meminta dukungan supaya ini menjadi perhatian.

* + 1. Peserta FGD I.

Jumlah peserta FGD I di tiga UIN akan diikuti 10 orang di setiap tempat. Kategori peserta dibuat sebagai berikut; UIN Sunan Kalijaga; UIn Malang dan UIN Jakarta. Adapun pesertanya adalah; 1. Pimpinan universitas inisial A. 2. Pimpinan LPPMA inisial B . 3. Pimpinan Fakultas inisial C. Pimpinan Prodi inisial D. 4. Pimpinan prodi B inisial E. 5. Pimpinan prodi dengan inisial E. Kriteria peserta FGD I: Sesuai dengan tujuan FGD I untuk merumuskan kebijakan, maka pesertanya adalah pimpinan universitas, fakultas, prodi, lppma.

* + 1. Tim Pelaksana FGD I.

Tim pelaksana FGD I adalah orang-orang yang dipercaya peneliti, yaitu; 1. Peneliti 2. Fauzan pencatat proses 3. Faisol penghubung peserta 4. Amin logistic.

Peneliti bertugas sebagai moderator yang memimpin FGD I. Tugasnya menjelaskan tujuan FGD kepada peserta dan memfaslitasi diskusi supaya sistematis terarah, efektif dan efisien. Adaun tujuan FGD I adalah mendefinisikan masalah, menyusun spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Kedua, mengkonstruksi model akademik yang sudah berjalan di UIN untuk disempurnakan dalam kebijakan yang diusulkan.

Pencatat proses bertugas merekam mencatat isi Persoalan yang didiskusikan dan mencatat dinamika fiorum. Alat bantu yg digunakan adalah computer, kamera, perekam, kertas, dan pena.

Penghubung peserta memiliki tugas sebagai penghubung sehingga mudah mendapatkan peserta. Petugas logistic bertugas menyiapkan konsumsi dan transportasi.

* + 1. Perlengkapan FGD.

Perlengkapan dalam FGD I adalah kertas plano, kertas warna warni, spidol, pena, white boar, proyektor, laptop, recorder dan kamera, dan kebutuhan lain yang diperlukan.

* + 1. Hari dan Tempat FGD.

FGD I akan dilaksanakan di tiga UIN dengan waktu sebagai berikut;

UIN Sunan Kalijaga : 1 November 2021

UIN Malang : 5 November 2021

UIN Jakarta : 10 November 2021

* + 1. Pelaksanaan FGD I.

FGD dibagi dalam dalam 2 sesi di setiao UIN: Sesi pertama, merumuskan masalah. Sssi kedia, merekonstruksi model akademik di tiga UIN. Masing-masing sesi 2 jam. Dengan jadwal sebagai berikut;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempat | Tanggal | Jadwal |
| UIN Sunan Kalijaga | 1 November 2021 | 08.15-08.30 Registrasi  08.30-09.00 Pembukaan  09.00-11.00 Sessi 1  11.00-13.00 Sessi II  13.00-13.15 Penutupan |
| UIN Malang | 5 November 2021 | 08.15-08.30 Registrasi  08.30-09.00 Pembukaan  09.00-11.00 Sessi 1  11.00-13.00 Sessi II  13.00-13.15 Penutupan |
| UIN Jakarta | 10 November 2021 | 08.15-08.30 Registrasi  08.30-09.00 Pembukaan  09.00-11.00 Sessi 1  11.00-13.00 Sessi II   * + - 1. Penutupan |

1. Tahapan pelaksanaan FGD I.

Tahapan pelaksanan FGD I adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra pelaksanaan.

Membentuk tim dan menyiapkan bahan dan kebutuhan untuk bisa terlaksanakannya FGD dengan baik.

1. Tahap pelaksanaan.

Adapun pada saat pelaksanaan FGD, tahapannya setelah pembukaan adalah; 1. Memulai diskusi (perkenalan menyampaikan tujuan) 2. Pada saat diskusi: focus pada tujuan dan mengelola waktu dengan baik 3. Saat akhir diskusi: Ditawarkan jika ada yang belum, masih bisa lanjut. Peneliti tidak berjanji untuk bisa menjalankan yang terkait dengan rekomendasi tetapi berharap tujuan rekomendasi bisa tercapai.

1. Materi diskusi FGD I.

Materi diskusi pada FGD I adalah sebagai berikut; 1. Merumuskan masalah kebijakan, bahan dari identifikasi sosial dan permasalahan di UIN yang telah diperoleh peneliti. 2. Merekonstruksi model akademik di UIN.

1. Teknik merumuskan masalah kebijakan.

Teknik merumuskan kebijakan dilakukan dengan cara mengadopsi teknik analisis kebijakan, dengan melibatkan masyarakat pengguna. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 1. Pencarian masalah kebijakan. Dilaksanakan pada penelitian tahap 1 (kualitatif). Tahap 1 peneliti melakukan pemotretan sosial, politik terutama yang terkait dengan masalah kebijakan. Peneliti menemukan meta masalah, berbagai masalah kebijakan yang belum tertata dengan rapi. 2. Pendefinisian maslaah kebijakan Dari meta dilakukan pendifinisian adalah awal FGD, dari pendifinisian diperoleh model yang cocok pengemnbangan akademik. Digali dari budaya akademik yang sudah ada supaya mudah dalam mengimplementasikan. 3. Spesifikasi masalah kebijakan; spesifikasi adalah masalah substantive, yaitu masalah kebijakan yang akan dirumuskan, yaitu pada aspek kebebasan akademik, integrasi dan kurikulum. 4. Pengenalan masalah kebijakan: dari spesifikasi dilakukan proses pengenalan masalah untuk menemukan masalah formal. Yaitu bagaimana model pengembangan akademik di UIN? Dari pertanyaan tersebut dikembangkan berbagai alternative yang data dgunakan untuk menyampaikan pesan dan menginternalisasikan nilai-nilai akademik di UIN.

1. Analisis hasil FGD.

Analisis bukan hanya mendiskripsikan, menggambarkan tetapi mengekplanasi. Menjelaskan, menghubungan sebab akibat dari FGD I. Analisis menghubung-hubungkan berbagai elemen factor yang kita identifikasi dalam data dan menjelaskannya (Irwanto, 2006; 18). Data FGD bersifat naratif.

Langkah analisis FGD: 1. Memeriksa apakah tujuan FGD sudah tercapai. Apakah jumlah pertanyaan sudah sesuai tujuan 2. Adakah tujuan perubahan fgd karena input dari peserta. 3. Identifikasi masalah utama dari peserta. Peneliti memperhatikan tema sentral dalam diskusi. 4. Adakah variasi peserta dalam tema ini. bagaimana variasinya mengapa. 5. Selain persoalan utama adakah persoalan lain yang muncul dalam diskusi apa saja, mana yang relevan? 6. Membuat kerangka prioritas dari persolan yang muncul berdasarkan sumber yang ada, kemendesakan, dan kemungkinan diselesaiakn. 7. Melakukan koding sesuai factor yang dikehendaki seperti: relasi, kekuasaan kesulitan, kerjasama konflik dll. Koding membantu melakukan analisis lebih dalam. 8. Dalam memikirkan rekomendasi perlu berfikir besar bertindak lokal. Ada kemungkinan FGD dengan cita2 besar teoritits dan praktis. Tugas utama adalam mencari kekhususan, baru mecari mana yang berlaku umum dr yang lain yang diteliti.

1. Analisis kebijakan dalam FGD II.

Tujuan FGD II adalah membuat formulasi kebijakan. Ada tiga topic utama yangdidiskusikan yaitu peramalan (foresting), pengembangan alternative kebijakan dan memilih alternative kebijakan yang terbaik unuk diusulkan alternative kebijakan.

1. Jumlah dan kriteria peserta.

Jumlah peserta di masing-masing UIN sebanyak 10 orang dengan kriteria berdasarkan tujuan umum membuat formulasi kebjakan. Sehingga ada 3 topik peramalan (foresting), pengembangan alternative kebijakan dan memilih alternative kebijakan yang terbaik unuk diusulkan alternative kebijakan. Maka peserta memiliki krieteria yang memiliki wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis yang lebih baik dari FGD I. maka yang dilibatkan adalah tokoh-tokoh. Peserta FGD yang lain adalah kolega dan pakar. Kolega adalah orang yang berprofesi sebagai pengamat pendidikan tinggi Islam. Pakar adalah orang ahli dalam topik yang didiskusikan bergelar doktor atau professor.

Jumlah peserta FGD II di tiga UIN akan diikuti 10 orang di setiap tempat. Kategori peserta dibuat sebagai berikut; UIN Sunan Kalijaga; UIn Malang dan UIN Jakarta. Adapun pesertanya adalah; 1. Pimpinan universitas inisial A. 2. Pimpinan LPPMA inisial B . 3. Pimpinan Fakultas inisial C. Pimpinan Prodi inisial D. 4. Pimpinan prodi B inisial E. 5. Pimpinan prodi dengan inisial E. Kriteria peserta FGD I: Sesuai dengan tujuan FGD I untuk merumuskan kebijakan, maka pesertanya adalah pimpinan universitas, fakultas, prodi, lppma.

1. Tim Pelaksana FGD I.

Tim pelaksana FGD I adalah orang-orang yang dipercaya peneliti, yaitu; 1. Peneliti 2. Fauzan pencatat proses 3. Faisol penghubung peserta 4. Amin logistic.

Peneliti bertugas sebagai moderator yang memimpin FGD I. Tugasnya menjelaskan tujuan FGD kepada peserta dan memfaslitasi diskusi supaya sistematis terarah, efektif dan efisien. Adaun tujuan FGD I adalah mendefinisikan masalah, menyusun spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Kedua, mengkonstruksi model akademik yang sudah berjalan di UIN untuk disempurnakan dalam kebijakan yang diusulkan.

Pencatat proses bertugas merekam mencatat isi Persoalan yang didiskusikan dan mencatat dinamika fiorum. Alat bantu yg digunakan adalah computer, kamera, perekam, kertas, dan pena.

Penghubung peserta memiliki tugas sebagai penghubung sehingga mudah mendapatkan peserta. Petugas logistic bertugas menyiapkan konsumsi dan transportasi.

1. Perlengkapan FGD.

Perlengkapan dalam FGD I adalah kertas plano, kertas warna warni, spidol, pena, white boar, proyektor, laptop, recorder dan kamera, dan kebutuhan lain yang diperlukan.

1. Hari dan Tempat FGD.

FGD II akan dilaksanakan di tiga UIN dengan waktu sebagai berikut;

UIN Sunan Kalijaga : 1 Desember 2021

UIN Malang : 5 Desember 2021

UIN Jakarta : 10 Desember 2021

1. Pelaksanaan FGD II.

FGD dibagi dalam dalam 2 sesi di setiap UIN: Sesi pertama, peramalan (foresting) dan pengembangan alternative kebijakan. Sesi kedua memilih alternative kebijakan yang terbaik. Masing-masing sesi 2 jam. Dengan jadwal sebagai berikut;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempat | Tanggal | Jadwal |
| UIN Sunan Kalijaga | 1 Desember 2021 | 08.15-08.30 Registrasi  08.30-09.00 Pembukaan  09.00-11.00 Sessi 1  11.00-13.00 Sessi II  13.00-13.15 Penutupan |
| UIN Malang | 5 Desember 2021 | 08.15-08.30 Registrasi  08.30-09.00 Pembukaan  09.00-11.00 Sessi 1  11.00-13.00 Sessi II  13.00-13.15 Penutupan |
| UIN Jakarta | 10 Desember 2021 | 08.15-08.30 Registrasi  08.30-09.00 Pembukaan  09.00-11.00 Sessi 1  11.00-13.00 Sessi II   * + - 1. Penutupan |

1. Tahapan pelaksanaan FGD I.

Tahapan pelaksanan FGD II adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra pelaksanaan.

Membentuk tim dan menyiapkan bahan dan kebutuhan untuk bisa terlaksanakannya FGD dengan baik.

1. Tahap pelaksanaan.

Adapun pada saat pelaksanaan FGD, tahapannya setelah pembukaan adalah; 1. Memulai diskusi (perkenalan menyampaikan tujuan) 2. Pada saat diskusi: focus pada tujuan dan mengelola waktu dengan baik 3. Saat akhir diskusi: Ditawarkan jika ada yang belum, masih bisa lanjut. Peneliti tidak berjanji untuk bisa menjalankan yang terkait dengan rekomendasi tetapi berharap tujuan rekomendasi bisa tercapai.

1. Materi FGD II.

Materi FGD II adalah peramalan (foresting), pengembangan alternative kebijakan dan memilih alternative kebijakan yang terbaik unuk diusulkan alternative kebijakan. Materi berurutan pertana peramalan, alternative, dan memilih.

Teknik peramalan (foresting), pengembangan alternative kebijakan dan memilih alternative kebijakan yang terbaik untuk diusulkan alternative kebijakan: mengadopsi teknik analisis kebijakan sebagai berikut: 1. Peramalan: melakukan peramalan masa depan yang hendak dicapai serta kemampuan dari setiap alternative ebijakan untuk mencapai masa depan tersebut. Tujuannya memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekwensinya. Melakukan control dan intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Jenis ramalan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan foresting proyeksi, ramalan yang didasarkan atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Masa lalu sebagai UIN periode awal di Indonesia. Saat ini UIN sangat maju dibandingkan yang lain namun meskipun dalam perengkingan tidak selalu nomor 1-3, namun masih punya citra yang bagus. Tiga UIN memperoleh mandat menjadi universitas kelas dunia.

Jenis masa depan yang diramalkan. Masa depan yang diramalkan di masa depan bersifat normative, yang seharusnya terjadi. Jika tiga UIN mengimplementasikan yang diusulkan dari penelitian ini maka diprediksi akan menjadi UIN terbaik di Indonesia.

Obyek peramalan. Dinamika sosial politik jika tidak dilakukan intervensi maka diperkirakan ketiga UIN akan mengalami kelambatan dalam akademik. Sebaliknya jika melakukan kebijakan maka akan bagus maka peru sosialisasi kebijakan ini untuk masa depan ketiga UIN

Pengembangan alternative kebijakan. Pengembangan alternative kebijakan dengan metode curah pendapat yang merupakan salah satu metode pengembangan alternative kebijakan (Patton & Sawicki, 1987’ 182-185). Metode ini dengan meminta pendapat pakar, kolega, konsultan dll tentang permsalahan dan peecahannya. Curah pendapat dalam bentuk FGD II.

Kriteria seleksi. Kriteria seleksi adalah kriteria terhadap berbagai alternative kebijakan yang diusulkan yaitu: kesesuaian dengan visi misi organisasi; partisipasi masyarakat; pemerataan/keadilan; aplikabel-dapat diimplementasikan; kelayakan teknis; efektifitas; tingkat penerimaan; kepantasan daya tanggap (sudah sesuai dengan kebutuhan); legal dan dukungan organisasi.

Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan tujuan utama analisis kebijakan, yaitu kebijakan yang paling unggul disbanding dengan alternative kebijakan yang lain (Subarsono, 2008; 65). Model rekomendasi kebijakan; 1. Metode perbandingan 2. Metode memuaskan 3. Lexicographic ordering 4. Non dominated alternatives 5. Metode may 6. Metode pro-kontra 7. Analisis biaya dan manfaat 8. Pohon keputusan 9. Teori profit dan 10. Rangking by inspection (Subarsono, 2008; 66).

Berdasarkan model di atas penelitian ini menggunakan model metode perbandingan. Sesuai dengan realitas, sehingga mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan nyata. Proses alternative ini menggunakan semua alternative kebijakan yanag akan dievaluasi diperbandingkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dipilih yang memperoleh nilai tertinggi. Kriteria sebagaimana disebutkan di atas, yaitu visi misi dan seterusnya.

Pemilihan alternative di FGD. Semua peserta untuk memberikan nilai kuantitatif pada masing-masing kriteria. Pemberian nila setiap kriteria terlebih dahulu dilakukan diskusi mendalam peserta FGD untuk mencaai nilai ydikehendaki. Besarnya nilai ditentukan berdasarkan asumsi ang digunakan dalam konteks di ketiga UIN. Alternatif yang dipilih berdasarkan skor tertinggi. Sebagaiman contoh dalam table berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria | Alternatif Kebijakan | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Kesesuaian visi misi |  |  |  |
|  | Partisipasi masyarakat |  |  |  |
|  | Pemerataan/keadilan |  |  |  |
|  | Aplikabel-dapat diimplementasikan |  |  |  |
|  | Kelayakan teknis |  |  |  |
|  | Efektifitas |  |  |  |
|  | Tingkat penerimaan |  |  |  |
|  | Sesuai dengan kebutuhan |  |  |  |
|  | Legalitas |  |  |  |
| j. j | dukungan organisasi. |  |  |  |

**DAFTAR PUSTAKA**

Abagnano, Nicola, “Humanism” dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. IV, New York: MacMillan Publish Co., Inc. & The Free Press.

Abdullah. Amin. (2005). *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Suanan Kalijaga.*  Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

…………….. (2014). “Religion. Science And Culture: An Integrated. Interconnected Paradigm of Science,” dalam *al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies”*. Vol. 52. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

…………….. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

…………….. (2012). “Islamic Studies In Higher Education In Indonesia Challenges, Impact And Prospects For The World Community”. *al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies”*. Vol. 55 No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

A Hanief Saha Ghafur. *Manajemen Penjaminan Mutu perguruan Tinggi di Indonesia Suatu Analisis Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Ajid. Thohir. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Albach. G Philip dan Salmi. Jamil. 2011. *The Road to Academiv Excellence Pendirian Universitas Riset Kelas Dunia. The Road to Academiv Excellence The Making of Wold-Class Research Universities* (Rahmat Purwono Penerjemah)*.* Jakarta: Salemba Humanika-The World Bank.

…………….. (2002). *Academic freedom: International realities and challenges.* *Higher Education 41: 205–219 Netherlands: Kluwer Academic Publishers.*

Al Rasyidin. (2016). “Islamic Organizations In North Sumatra: The Politics of Initial Establishment and Later Development,” dalam *Journal of Indonesian Islam*. Vol. 10. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Aziz.Safrudin. (2016). *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Koreksi dan Implementasi.* Yogyakarta: Gava media.

Azra. Azyumardi. (2014). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milinium III*. cet. 2. Jakarta: Kencana.

……………... (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi,* Jakarta: Kompas.

Bagir, Zainal Abidin. (2005). “Bagaimana “Mengintegrasikan” Ilmu dan Agama?”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk (eds.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi.* Bandung: MMU.

Bakar, Osman. (1991). *Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam* terj. Yuliani Liputo. Bandung: Pustaka Hidayah.

Baharudin dkk. (2014). *Reorientasi Tradisi Perguruan Tinggi Islam Menuju WCU.* Malang: UIN Maliki Press.

Bilgrami, Hamid Hasan dan Sayid Ali Asyraf. (2002). *Konsep Universitas Islam,* terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Bogdan dan Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.* Surabaya: Usaha Nasional.

Burhanuddin. Jajat. (2014). “The Dutch Colonial Policy On Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje,” in *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*. Vol. 52. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Creswell. John. (2003).  *Research Design Kualitatif. Kuantitatif dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

…………….. (2013).  *Penelitian Kualitatif dan Desain* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

……………... (2015). *Riset Pendidikan Perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Duun. William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* Yogyakarta: UGM Press.

…………….... (2014). *Public Policy Analysis Fifth Edition.* Person Education Limited: USA.

Fisher. Frank, Miller J Gerald, Sidney S Mara.(2015). *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode.* Bandung: Nusa Media.

Furchan. Arief. Muhaimin. Agus Maimun. (2005). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gleason W Nancy (ed.) (2018),  *Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution,* Palgrave: Macmillan.

Hadi. Hasbullah. *et al*. (2016). *Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler,*”dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. XL.

Hadi. Samsul, dkk. (2011). *Metode Riset Evaluasi.* Laksbang Grafika. Yogyakarta.

Haidar. Daulay Putra. (2012). *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia.* Medan: Perdana Publishing. 2012.

……………... *(*2006). Pendidikan *Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hasan. M. Tholhah. (2003). *Islam dan Masalah Sumber daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Pers.

Hasibuan. Lias. (2008). “Pengembangan Sistem Perkuliahan Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. XXXII.

Huidobro. Juan Cristobal Garcia. (2017). “Addressing the crisis in curriculum studies: curriculum integration that bridges issues of identity and knowledge” dalam *The Curriculum Journal*” Vol 19. Oktober 2017.

Hussain, Amjad M. (2007). “Towards solving the crisis of Islam in higher education” dalam Journal of Beliefs & Values, Vol. 28, No. 3, December 2007, pp. 267–272 Taylor & Francis.

Idris. Muh. (2014). “Konsep Pendidikan Humanis dalam Pengembangan Pendidikan Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. XXXVIII.

Irfan. Agus. Didik Murwantono. 2018. *Islamic Academic Culture (BudAi) Model as A Strategy of Education and Civilization in Sultan Agung Islamic University (UNISSULA)* Semarang: Theory and Practice. Proceedings of International Conference “Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness” Semarang:.

Jóhannessona, Ásgeir B, Kristín Norðdahlb, Gunnhildur Óskarsdóttirb, Auður Pálsdóttirb and Björg Pétursdóttirc. (2017). “Curriculum analysis and education for sustainable development in Iceland Ingólfur”. Dalam *Journal Environmental Education Research* Vol. 17, No. 3, June 2017, 375–391

Jones. Gareth Elwyn Jones (2009). “History in the National Curriculum: a lesson in curriculum devolution” dalam *The Curriculum Journal* Vol. 20 No 4 Desember.

Kartowagiran. Badrun. (2013). *Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran Teknik Mesin Melalui Logic Model untuk Meningkatkan Soft Skills Lulusan,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Selasa 10 Juni.

Koesnadi Hardjosoemantri. (2001) *Perguruan Tinggi dan Pembangnan berkelanjutan (Sebuah Aspek Hukum).* Jakarta: Dirjen pendidikan Tinggi Departemen pendidikan dan kebudayaan.

Kysilka Marcella L.. 2006. “Understanding integrated curriculum” dalam *The Curriculum Journal*  Vo. 9 No. 3.

Leite. Carlinda, Preciosa Fernandes & Carla Figueiredo. (2019). “National curriculum vs curricular contextualisation: teachers’ perspectives” dalam *Journal Educational Studies,* Vol 19.

Lubis. Fadhil Nur A. (2014). *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU-*Bandung: Citapustaka Media.

Mahfud. Choirul. (2016). *Politik Pendidikan Islam Pasca Orde Baru.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Markum. M. Enoch. *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. 2007

McDonald. Ria & Helen Van Der Horst. (2017). “Curriculum alignment, globalization, and quality assurance in South African higher education”. *Journal of Curriculum Studies* http://www.tandfonline.com/loi/tcus20.

Meij. Leoniek Wijngaards-de & Sigrid Merx. (2018). “Improving curriculum alignment and achieving learning goals by making the curriculum visible.” *International Journal for Academic Development. Roudledge:* Inggris.

Millar. Victoria. (2016). “Interdisciplinary curriculum reform in the changing university” dalam *Teaching In Higher Education*, Vol. 21, NO. 4, 471–483

Noel M. Meyers a & Duncan D. Nulty b. (2017). “How to use (five) curriculum design principles to align authentic learning environments, assessment, students’ approaches to thinking and learning outcomes”. *Journal of Curriculum Studies* http://www.tandfonline.com/loi/tcus20.

Muhaimin. (2012) *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.

Mulkan. Abdul Munir. (2008). “Islamic Education And Da’wah Liberalization: Investigating Kiai Achmad Dachlan’s Ideas”. dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*. Vol. 46.

Mulyono Mulyono1. 2018. *Academic and Culture Development Strategy Management for Islamic Higher Education In Indonesian.* Conference Series: Earth and Environmental Science.

Musthofa. Ismail Suardi Wekke. Rembangy. (2008). *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi.* Yogyakarta: Teras.

Muzayyin. Arifin. (2007). *Kapita selekta Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nizar. Samsul. *et al*.(2013). *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nugroho. Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.* Elek Media Komputindo. Jakarta.

Noor. Firman. (2016). “Islamic Party And Pluralism: The View and Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-1960),” dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*. Vol. 54.

Noel M. Meyers a & Duncan D. Nulty b. (2017). “How to use (five) curriculum design principles to align authentic learning environments, assessment, students’ approaches to thinking and learning outcomes”. *Journal of Curriculum Studies* http://www.tandfonline.com/loi/tcus20.

Ornstein, Allan C & Hunkis, Francis P (2009), *Curriculum Foundation, Prinsiples and Issues,* Boston: Pearson International Edition

Oliva. F Peter. (1982).  *Developing the Curriculum.* Boston. Litle Brown and Comppany.

Patton. Q. Quinn. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Parsons, Wyne (2005), An Introduction to the Theory an Practice of Policy Analysis, Terj. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan,* Jakarta: Kencana.

Priestley. Mark, Sarah Minty and Michelle Eager. (2014). “School-based curriculum development in Scotland: curriculum policy and enactment” dalam Journal *Pedagogy, Culture & Society*, Vol. 22, No. 2, 189–211,

Penprase B. Edward (2018). “The Fourth Industrial and Higher Education” dalam Gleason W Nancy (ed.),  *Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution,* Palgrave: Macmillan.

Qomar. Mujamil. (2012). *Fajar Baru Islam Indonesia: Kajian Komprehensif Atas Sejarah dan Dinamika Intelektual Nusantara.* Bandung: Mizan Pustaka.

Rataa. Elizabeth, Graham McPhailb and Brian Barrettc. (2019). “An engaging pedagogy for an academic curriculum” dalam *The Curriculum Journal*  Vol. 30.

Roberts. Pamela. (2015). “Higher education curriculum orientations and the implications for institutional curriculum change” dalam *Journal Teaching in Higher Education,* Vol. 20, No. 5, 542–555.

Roqib. M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah. Keluarga. dan Masyarakat.* Yogyakarta: LKiS*.*

Schiro, Michael S, (2017), *Teori Kurikulum; Visi-Visi yang saling Bertentangan dan kekhawatiran tanpa Henti,* Judul asli *Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concern,* Endah Sulistyowati (Penerjemah), Jakarta: Indeks.

Schwab, Klaus (2016), *The Fourth Industrial Revolution,* World Economic Forum Cologny Switzeland.

Schwab, Klaus (2019), *Revolusi Industri Keempat,*  Alih Bahasa Farah Dina dan Andi Tarigan, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sarid. Ariel.(2018). “Rethinking the modernist curriculum with Habermas’s concept of self-critical appropriation” dalam *Journal of CurriCulum StudieS.* http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2017.1307457

Shahidi. Nina. Noorabad Mamasani Branch. (2012). “The Impact of Globalization in Higher Education on the Universities' Educational Quality: A Regional Project on Shiraz Universities” dalam World Applied Sciences Journal 20 (9). Iran: Islamic Azad university,Noorabad Mamasani.

Sivesinda. Kirsten and Ian Westburyb. (2016). “State-based curriculum-making, Part I” dalam Journal of CurriCulum StudieS, Vol. 48, no. 6, 744–756.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan.* Alfabeta Bandung.

Sukiman. 2015. *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi.* Remadja Rosdakarya. Bandung.

Sutrisno dan Suyadi. (2016). *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengau Kerangka Kualifkasi Nasional Indonesia.*  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryadi . Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu pengantar.* Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya.

Suyanto. (2006). *Di Belantara Pendidikan Bermoral Biografi Pemikiran dab Kepemiminan.* Yogyakarta: UNY Press.

Syamsuddin. Abdullah. (1997). *Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tim Penyusun. (1998). *Sistem Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga.* Yogyakarta. IAIN Sunan Kalijaga. 1998.

Tolchah. Moch. “The Political Dimension of Indonesian Islamic Education in the Post-1998 Reform Period,” in *Journal of Indonesian Islam.* Vol. 08. 2014.

Shils. Edward. 1993). *The Academic Ethics. Terjemahan* Etika akademis (A Agus Nugroho). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Jakarta.

Suparlan Parsudi. 1993. “Kata Pengantar” dalam *The Academic Ethics. Terjemahan* Etika akademis (A Agus Nugroho). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Jakarta.

Wahyudi. Isa. (2006). *Metodologi Perencanaan Partisipatif Berst Practice untuk pelaksanaan musrembang.* Jakarta. MCW-Yappika.

Westburya. Ian, Jessica Aspforsb, Anna-Verena Friesc, Sven-Erik Hansénd. (2016). “Organizing curriculum change: an introduction” dalam *Journal of CurriCulum StudieS,* Vol. 48, no. 6, 729–743.

Geoff Whitty. (1987). “Curriculum Research and Curricular Politics” dalam British Journal of Sociology of Education, Vol. 8, No. 2, 109.

Yatim. Badri. (2003). *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yin, Rober K., (2014), *Case Study Research Design and Methods, 5 Editin,* Californio: Sage Publication Inc.

Yin, Robert K., (2009), *Studi Kasus Desain dan Metode,* Jakarta: Rajawali Pers.

Yunus. Mahmud . (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Hidakarya.

Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.